

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN KENDAL**
(Studi Politik Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa
Johorejo, Kecamatan Gemuh Tahun 2018)

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)
Jurusan Ilmu Politik



oleh:

FITHROH AMALIKA DEWI
1506016008

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Fithroh Amalika Dewi
NIM : 1506016008
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan di Kabupaten Kendal (Studi Politik Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh Tahun 2018)

Dengan ini telah disetujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 20 November 2019

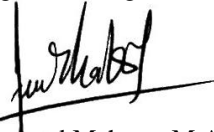
Pembimbing,

Bidang Substansi Materi



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP: 196805051995031002
Tanggal: 30 Oktober 2019

Bidang Metodologi & Tata Tulis



Muhammad Mahsun, M.A
NIP: -
Tanggal: 19 November 2019

PENGESAHAN

SKRIPSI

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN KENDAL
(Studi Politik Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Johorejo, Kecamatan
Gemuh Tahun 2018)

Disusun Oleh:
Fithroh Amalika Dewi
1506016008

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 10 Desember 2019

Susunan Dewan Penguji

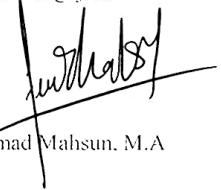
Ketua/Penguji I



H. Amin Farid, M.Ag

NIP. 19710614 200003 1 002

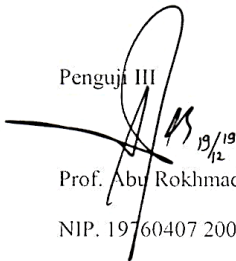
Sekretaris/Penguji II



Muhammad Mahsun, M.A

NIP. -

Penguji III

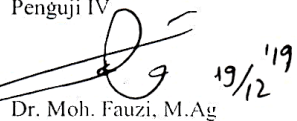


Prof. Abu Rokhmad, M.Ag

NIP. 19760407 200112 1 003



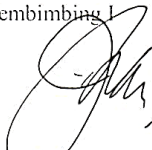
Penguji IV



Dr. Moh. Fauzi, M.Ag

NIP. 19720517 199803 1 003

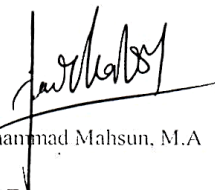
Pembimbing I



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

NIP. 19680505 199503 1 002

Pembimbing II



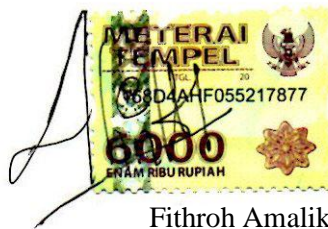
Muhammad Mahsun, M.A

NIP. -

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Desember 2019



Fithroh Amalika Dewi
1506016008

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN KENDAL (STUDI POLITIK DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA JOHOREJO, KECAMATAN GEMUH TAHUN 2018)”. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.IP) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin dalam pelaksanaan penulisan skripsi penulis.
3. H. Adib, S.Ag, M.Si dan Bapak Muhammad Mahsun, M.A selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah

memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.

4. Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag dan Muhammad Mahsun, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah sabar dan tulus dalam memberi masukan maupun arahan, menuntun, memotivasi, dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.
6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Subarso, S.Sos. MA selaku kepala Dinas Sosial Kendal yang telah membantu penulis memberikan informasi untuk memberikan data.
8. Bapak Arief Budiyanto, S.E selaku Kepala Desa Johorejo dan Masyarakat Desa Johorejo Kecamatan Gemuh yang telah menerima dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Yang tercinta orang tua penulis Ayah Nadhifin dan ibu Siti Rofaatun yang menyayangi, mendo'akan setulus hati serta memberikan keridhoan agar sukses dalam menyusun skripsi ini.
10. Ahmad Taqiyyudin Ash Shidiki dan Ahmad Haris Miftahudin adik-adikku tercinta yang mendorongku untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Orang tua kedua penulis, Bapak K.H Amnan Muqoddam dan Ibu Nyai Hj. Rofiqotul Makiyyah, A.H. Yang telah meridhoi setiap langkah dalam penyusunan skripsi ini.
12. Rekan-rekan Ilmu Politik angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang dalam bangku kuliah dan selalu memberi masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

13. Kamar Ash-Shogiriku terutama Blok D'dek emesh (mba Dwi, Nila, Upita, Chilma, Rifqi, dek Lina, dek Rina, dek Dian, dek Mailia, dek Elly, dek Vella, dek Astri, dek Fitri, ukhty Iqoh) yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
14. Posko 28 KKN Purwosari Mijen (Affan, Udin, Fahmi, Rizal, Ikhyah, Arisqi, Ro'i, Arum, Yani, Siti, Nana, Vinsya, Any, Iis) yang telah mendukung dan memberikan semangat penulis.
15. Sahabat penulis (Aida, Ardina, Ratna, Nizza, Rifqi, Faiz, Ihsan) yang selalu memberikan motivasi penulis.
16. Kakak tercinta penulis Ehsan Hidayat, M.H, yang telah setia menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan bantuan baik secara material atau non material yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua, penulis mengucapkan *jazakumullah ahsanal jaza', wa jazakumullah khairan katsiran*. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta kesalahan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Aamiin

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan serta
menjadi penyemangat penulis selama ini.

Almamater penulis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang.

Guru penulis dari penulis lahir sampai sekarang.
Pondok Pesantren Putri Tahfidhul Qur'an Al Hikmah Tugurejo Tugu
Semarang.

MOTTO

Surat An Nisa ayat : 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

ABSTRACT

Development is an ongoing effort to create conditions that can provide more valid alternatives for every citizen to achieve his most humanistic aspirations. In general, the most humanistic aspirations are expressed as improving people's welfare. Given that poverty in Indonesia is still quite high. One of the poverty reduction programs is the Non-Cash Food Aid Program. One of the goals is to reduce the expenditure burden of Beneficiary Families through meeting food needs.

In Johorejo village Gemuh sub-district Kendal district is one of the villages that received Non-Cash Food Assistance and has been going on since 2017. The reason the authors examined in Johorejo village was because there were people who complained that they only received three times the assistance. Previously, the community received a social assistance called Raskin and then it was updated to Rastra and what is currently underway is the Non-Cash Food Assistance program. The author wants to examine how BPNT's policies work in Johorejo village.

The research method that I use is a qualitative method with a case study approach that is a study in which the researcher explores a particular phenomenon (case) in a given time and activity (program, event, process, institution or social group) and collects detailed and in-depth information using various data collection procedures for a certain period.

The results of this study are the BPNT program in Johorejo village that has been implemented well. Recipient communities say BPNT is helping in their economy. After the operation of BPNT, economic problems were slightly resolved. The money that is usually spent to buy groceries can be used for other needs, at least it can ease their expenses.

Keywords: Policy, BPNT, welfare development.

ملخص

التنمية هي جهد مستمر لتهيئة الظروف التي يمكن أن توفر بدائل أكثر صالحة لكل مواطن لتحقيق تطلعاته الإنسانية. بشكل عام ، يتم التعبير عن التطلعات الأكثر إنسانية على أنها تحسين رفاهية الناس. بالنظر إلى أن الفقر في إندونيسيا لا يزال مرتفعاً للغاية. أحد برامج الحد من الفقر هو برنامج المساعدات الغذائية غير النقدية ، والذي يتمثل أحد أهدافه في تخفيف عبء الإنفاق على الأسر المستفيدة من خلال تلبية الاحتياجات الغذائية.

في قرية جوهوريجو، تعد منطقة كندال في مقاطعة كندال واحدة من القرى التي تلقت المساعدات الغذائية غير النقدية وما زالت مستمرة منذ عام ٢٠١٧. وكان السبب في فحص المؤلفين في قرية جوهوريجو هو وجود أشخاص اشتكوا من أنهم تلقوا ثلاثة أضعاف المساعدة فقط. في السابق ، تلقى المجتمع مساعدة اجتماعية تسمى الأرز الرديء ، ثم تم تحديثه إلى الأرز المزدهر وما يجري حالياً هو برنامج المساعدات الغذائية غير النقدية. يريد المؤلف أن يدرس كيف يتم تطبيق سياسة المساعدات الغذائية غير النقدية في قرية جوهوريجو.

طريقة البحث التي أستخدمها هي طريقة نوعية مع منهج دراسة الحالة وهي دراسة يستكشف فيها الباحثون ظاهرة معينة (حالة) في وقت معين ونشاط معين (برنامج أو حدث أو عملية أو مؤسسة أو مجموعة اجتماعية) وجمع معلومات مفصلة ومعمقة باستخدام إجراءات جمع البيانات المختلفة لفترة معينة.

نتائج هذه الدراسة هي برنامج المساعدات الغذائية غير النقدية في قرية جوهوريجو قد تم تنفيذها بشكل جيد. وتقول المجتمعات المتلقية إن المعونة الغذائية غير النقدية تساعد في اقتصادها. بعد مرور المعونة الغذائية غير النقدية ، تم حل المشكلة الاقتصادية قليلاً. يمكن استخدام الأموال التي يتم إنفاقها عادة لشراء منتجات البقالة لتلبية الاحتياجات الأخرى، على الأقل يمكن أن تخفف نفقاتها.

الكلمات المفتاحية: السياسة ، المساعدات الغذائية غير النقدية.

ABSTRAK

Pembangunan adalah upaya berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (valid) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Pada umumnya, aspirasi yang paling humanistik tersebut dinyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat bahwa kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Salah satu program penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan kebutuhan pangan.

Di desa Johorejo kecamatan Gemuh kabupaten Kendal merupakan salah satu desa yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai dan berlangsung sejak tahun 2017. Alasan penulis meneliti di desa Johorejo karena ada masyarakat yang mengeluh hanya mendapatkan tiga kali bantuan saja. Sebelumnya, masyarakat menerima bantuan sosial yang bernama Raskin kemudian diperbarui menjadi Rastra dan yang saat ini sedang berjalan yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai. Penulis ingin mengkaji bagaimana kebijakan BPNT yang berjalan di desa Johorejo.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu sebuah penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Hasil penelitian ini adalah program BPNT di desa Johorejo sudah terlaksana dengan baik. Masyarakat penerima mengatakan BPNT membantu dalam perekonomian mereka. Setelah berlalunya BPNT, masalah perekonomian sedikit teratasi. Uang yang biasa dibelanjakan buat beli sembako bisa digunakan untuk kebutuhan lain, setidaknya dapat meringankan pengeluaran mereka.

Kata kunci: Kebijakan, BPNT, pembangunan kesejahteraan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	4
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENTASAN KEMISKINAN dan BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)

A. Kebijakan Publik	21
B. Kesejahteraan	26
1. Pengertian Kesejahteraan	26
2. Kesejahteraan dan Kualitas Hidup	28
3. Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial	29
4. Kesejahteraan Sosial Dalam Pembangunan	31
C. Pengentasan Kemiskinan	32
1. Pengertian Kemiskinan	32
2. Faktor-Faktor Timbulnya Kemiskinan .	36

3. Karakteristik Kemiskinan	39
4. Program Pengentasan Kemiskinan.....	40
5. Dampak Dari Kemiskinan.....	41
D. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	44
1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	44
2. Tujuan, Manfaat dan Besaran Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT).....	45
3. Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	47

BAB III LANSKAP DESA JOHOREJO KECAMATAN GEMUH

A. Gambaran Umum Desa Johorejo	49
1. Sejarah Terbentuk	49
a. Kondisi Geografi.....	50
b. Jumlah Penduduk Desa Johorejo ..	52
c. Tingkat Pendidikan	53
d. Infrastruktur desa Johorejo	55
e. Ragam Pekerjaan Desa Johorejo ..	56
2. Kondisi Ekonomi Warga Desa Johorejo	58

BAB IV KEBIJAKAN POLITIK DAN MODEL TERHADAP DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA JOHOREJO

A. Kebijakan Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Tahun 2018.....	61
B. Pola Distribusi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	71
C. Cara Rakyat Mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	81

D. Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Pembangunan Kesejahteraan .	84
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jarak Tempuh	52
Tabel 2	Jumlah Penduduk	53
Tabel 3	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Johorejo	54
Tabel 4	Jenis dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Johorejo	57
Tabel 5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha..	60
Tabel 6	Jumlah Penerima BPNT dan PKH di Desa Johorejo	68
Tabel 7	Jumlah Penerima BPNT Berdasarkan Pekerjaan ..	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Desa Johorejo	50
Gambar 2	Peta Desa Johorejo	51
Gambar 3	Distribusi BPNT dari Kabupaten Ke Kecamatan .	62
Gambar 4	E-warung “Rizki Barokah”	68
Gambar 5	Cara Mendapatkan Bpnt	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017
Lampiran 2	Permensos Nomor 11 Tahun 2018
Lampiran 3	Wawancara Dinsos
Lampiran 4	Wawancara Penerima
Lampiran 5	Wawancara Bukan Penerima
Lampiran 6	Gambar Balai Desa Johorejo
Lampiran 7	Draf Wawancara Dinas Sosial
Lampiran 8	Draf Wawancara Pemilik e-warung
Lampiran 9	Draf Wawancara Sekretaris desa
Lampiran 10	Draf Wawancara Penerima

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional negara Indonesia salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Midgey (1997, dalam Fahrudin, 2014) mengatakan bahwa konsep kesejahteraan digunakan untuk menyatakan suatu negara yang pemerintahnya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang luas kepada warga negaranya.

Kesejahteraan umum menurut Badan Pusat Statistik (2000) merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dan tingkat kemiskinan di Indonesia, semakin rendah tingkat kemiskinan di Indonesia menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk di Indonesia.

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian di hampir setiap negara terlebih lagi di negara berkembang seperti Indonesia (Rofiq, 2014). Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karna itu, upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara benar, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu (Jundi, 2014). Peningkatan ekonomi juga menjadi perhatian serius

pemerintah untuk mendorong masyarakat lebih sejahtera dan lebih baik dalam kehidupan ekonominya (Hayat, 2017).

Strategi penanggulangan kemiskinan yang sangat erat kaitanya dengan perspektif pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial adalah perlindungan sosial (*sosial protection*). Perlindungan sosial merupakan skema untuk melindungi masyarakat dari berbagai resiko dalam kehidupan, baik resiko yang timbul dari dirinya (kecelakaan, sakit, meninggal) maupun dari sekitarnya (bencana alam/sosial). Salah satu bentuk perlindungan sosial adalah

bantuan sosial yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan berdasarkan “test kemiskinan” tanpa meperhatikan kontribusi sebelumnya (*prior contribution*). Tunjangan kesejahteraan bagi keluarga miskin, pengangguran, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia merupakan beberapa contoh bantuan sosial (Edi, 2005). Bantuan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikologi dan ekonomi), serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar (Kemensos, 2017).

Ditahun 2018 kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten yang memiliki penduduk miskin mencapai 63.000 atau 6,4 persen

dari jumlah total 991,686 jiwa. Salah satu program pemerintah Kendal untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok atau menurunkan tingkat kemiskinan adalah diadopsinya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2018.

Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara. Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif, dan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu (Jogloabang, 2018).

Secara nasional, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mendapat dukungan legitimasi sebenarnya baik dari peraturan Presiden maupun peraturan Menteri. Diantara Peraturan Presiden adalah Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Kemudian Peraturan Menteri Sosial terkait kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diatur dalam Permensos Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kendal bukan berdasarkan

inisiasi murni dari Bupati tetapi merupakan kebijakan turunan dari kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan memang haruslah segera ditangani secara serius oleh individu itu sendiri dan pemerintah. Dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang mempunyai atau yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi keluarganya.

Oleh karena itu pemberian subsidi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 110.000, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain-lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu (Risnandar & Broto, 2018). Program BPNT merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam perubahan pola pengeluaran rumah tangga yaitu dengan peningkatan konsumsi pangan maupun non pangan rumah tangga.

Program ini diharapkan dapat mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga masyarakat Kendal yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran. Akan tetapi ada beberapa masyarakat di kabupaten Kendal yang mendapatkan Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) mengeluh karena mereka mendapatkan bantuan hanya 3 kali. Kebijakan ini sangat penting karena sangat berpengaruh terutama masyarakat kurang mampu, mereka mengharapkan bantuan dari pemerintah agar ekonominya dapat terbantu, tetapi penulis tidak akan mengkaji secara level kabupaten. Untuk melihat bagaimana kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bekerja, penulis akan melakukan kajian secara mendalam dengan lebih dekat memahami praktek ini di tingkat desa. Desa Johorejo merupakan salah satu desa yang berada pada kecamatan Gemuh, kabupaten Kendal yang juga sudah menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Johorejo kecamatan Gemuh, kabupaten Kendal ini, tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima program bantuan dari pemerintah yang dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH). Penerima PKH hanya yang benar-benar membutuhkan atau yang paling miskin saja yang menerimanya, tetapi semua penerima PKH sudah pasti menerima BPNT. Program Keluarga Harapan (PKH) ini berupa uang yang keluar setiap 3 bulan sekali, dan jumlah setiap Kartu Keluarga (KK) tidak sama nilai nominal uang yang diterimanya.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik mengkaji tentang kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), karena program BPNT ini merupakan pembaruan dari program raskin dan program rastra yang mana program tersebut memang sudah

cukup lama ada dan sudah sampai tiga kali diperbaharui dan yang terakhir ini bernama program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk itu penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil judul “Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Di Kabupaten Kendal : Studi Politik Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, penelitian ini akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kebijakan BPNT dibuat oleh pemerintah daerah di desa Johorejo?
2. Bagaimana pola distribusi program BPNT di desa Johorejo?
3. Bagaimana dampak program BPNT pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Johorejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan BPNT yang dibuat oleh pemerintah daerah Kendal.
2. Untuk mengetahui pola distribusi program BPNT ke masyarakat desa Johorejo.
3. Untuk mengetahui dampak program BPNT pada pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kendal desa Johorejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam lingkup ilmu politik kaitanya dengan program bantuan sosial yang diadakan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu.

2. Manfaat praktis

Dapat bermanfaat bagi para pembaca, masyarakat, pemerintah dan sebagai koreksi sejauh mana program BPNT berhasil dalam mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu di desa Johorejo.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian adalah sebagai bahan terhadap penelitian yang ada. Baik mengenai kelebihan maupun kekurangannya, sekaligus sebagai bahan komparatif terhadap kajian yang terdahulu. Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama baik dalam bentuk skripsi, buku, dan dalam bentuk tulisan yang lainnya.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu tentang kebijakan pembangunan kesejahteraan, peneliti menemukan kajian yang memiliki tema hampir sama. Adapun beberapa kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, studi politik pembangunan kesejahteraan mengkaji tentang penyaluran anggaran dari pemerintah untuk masyarakat. Diantara studi ini adalah skripsi yang ditulis oleh Bayu Fitriawan pada tahun 2017 dengan judul “*Pengaruh Faktor Sosioekonomi dan Politik Terhadap Distribusi Anggaran Conditional Cash Transfer di Indonesia*”. Dengan menggunakan metode kualitatif, skripsi ini memfokuskan kajian pada dana alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2013-2015. Kesimpulannya distribusi anggaran CCT (*Conditional Cash Transfer*) lebih dipengaruhi oleh faktor politik dibandingkan dengan faktor sosioekonomi. Tidak adanya faktor sosioekonomi terhadap distribusi CCT mengindikasikan bahwa CCT yang merupakan program perlindungan sosial, tidak dapat melakukan fungsi redistribusi (Fitriawan, 2017).

Selain itu, artikel yang ditulis oleh Debby Chintia Permata Sari pada tahun 2016 dengan judul “*Impor Kedelai Indonesia dari Amerika Serikat (Analisis Ekonomi Politik)*” artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, fokus kajian pada dampak kesejahteraan petani kedelai. Kesimpulannya yaitu adanya faktor internal yaitu ketidakmampuan kapabilitas sistem politik Indonesia sehingga dalam pendistribusian kedelai mengalami problematika (Sari, 2016).

Kedua, studi pembangunan kesejahteraan fokus tentang kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan. Diantara studi ini adalah skripsi yang ditulis saudari Hikmah Wati dari

Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul *“Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kota Lampung”*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, tetapi dalam menganalisis data, didukung data-data kuantitatif. Kesimpulannya di Provinsi Lampung ada faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan penyaluran bantuan terhadap fakir miskin yaitu Minimnya pengetahuan kelompok KUBE di Provinsi Lampung dalam pembuat rekening untuk kepentingan bersama yang menghabiskan waktu cukup lama dalam Bahasa, terkadang saat sosialisasi dan evaluasi seksi pemberdayaan fakir miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung mengalami kesulitan interaksi dengan anggota KUBE karena mereka terkadang masih sering menggunakan bahasa suku atau bahasa daerah masing-masing (Wati, 2016).

Skripsi yang ditulis Fifi Ulid Khoiro Taufiqo dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Fakultas ekonomi Pembangunan dengan judul *“Dampak Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap distribusi Pendapatan rumah Tangga Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia”*. Penelitian ini membahas tentang BPNT yang dapat meratakan distribusi pendapatan, sehingga BPNT perlu untuk dilanjut agar keluarga penerima manfaat lebih luas sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong kegiatan ekonomi melalui BPNT. Kesimpulannya Bantuan Pangan Non Tunai mengakibatkan

distribusi pendapatan rumah tangga semakin merata dengan nilai koefisien gini turun sebesar 0,2208 dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perlu untuk dilanjutkan agar keluarga penerima manfaat lebih luas sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong kegiatan ekonomi melalui e-warong (Fifi & Taufiqo, 2018).

Selanjutnya skripsi dari Tondhi Ramadhan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru dengan judul skripsi “*Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru*”. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan secara parsial dapat diketahui bahwa variabel Efektivitas Program BPNT mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Ramadhan, 2018).

Dari kajian beberapa skripsi di atas, peneliti berpendapat ada persamaan dan perbedaan studi-studi tentang politik pembangunan kesejahteraan yang terkait dengan program bantuan pangan non tunai. Persamaan studi di atas dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang program bantuan dari pemerintah serta dampaknya yang mempunyai pengaruh besar untuk kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya yaitu beberapa sarjana di atas mengkaji tentang penyaluran anggaran program BPNT sedangkan peneliti membahas tentang kebijakakan BPNT yang dibuat oleh pemerintah serta pola distribusinya. Studi ini ingin mengisi kekosongan tersebut, maka penelitian ini penting untuk

dilakukan dengan menempatkan fokus kajian pada politik distributif dan pembangunan kesejahteraan studi kasus program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Kendal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang. Proses penelitian kualitatif mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif, menafsirkan makna data Alboin (2017 dalam John W. Creswell, 2010).

Penelitian kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif lapangan dan kualitatif kepustakaan, adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan deskriptif karena dalam proses penulisannya dengan mendeskripsikan hasil penelitian dan tidak menggunakan angka (Moleong, 2018). Dalam pengertian lain yang dimaksud dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang menggunakan data dan sumber informasi lapangan, yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat (Suryabrata S. , 2013).

Sedangkan pendekatan studi kasus (*case study*) adalah sebuah penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Yani dalam John W. Creswell, 1998, hlm 37-38).

Studi kasus merupakan kajian dengan memberi batasan yang tegas terhadap suatu objek dan subjek peneliti tertentu, melalui pemusatan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci (Indrawan & Yaniawati, 2005, 135).

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek darimana data dapat diperoleh (Suryabrata, 1987) dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti, baik melalui observasi dan wawancara. Peneliti bertanya langsung kepada pengelola data dinas sosial Kendal (Jiwan Sanjay), sekretaris desa Johorejo (Sukron Adin), Kasi pemerintahan (Romdhon), pemilik e-warung “RIZKI BAROKAH” (Sutriyah), Narasumber

penerima BPNT desa Johorejo (Eni, Noviyani, Siti Nur Istirokhah, Surati, Nafiatun, Siti Komala, Remi, Rusdi, Tumi, Muryati), Narasumber yang tidak mendapatkan BPNT (Sri Sugiharti, Reti, Fatimah, Kumanah)

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data yang diperoleh penulis berupa laporan dari dinas sosial Kendal yakni laporan from kontrol pencairan BPNT Kabupaten Kendal tahun 2018. Laporan tersebut digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

- b. Adapun jenis data dalam penelitian ini menggunakan *field research* (Muhadjir, 1996) Yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi : letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan wilayah, keadaan pemerintah, keadaan inftrastruktur, keterlibatan warga dalam kebijakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi adalah sebuah proses penggalan data yang dilakukan oleh peneliti sendiri, dengan cara pengamatan mendetail terhadap masyarakat sebagai objek pengamatan dan lingkungannya dalam kancan riset (Herdiansyah, 2013).

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut apa yang dikerjakan sumber data dan ikut merasakan suka dukanya (Sugiyono, 2013). Kemudian mencatat apa yang dilakukan masyarakat. Data tersebut nantinya akan di analisis kembali. Tujuan tahap observasi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembagian bantuan untuk masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Wawancara secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden (biasanya melalui jasa pos), dan responden menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis, kemudian mengirimkannya kembali daftar pertanyaan yang telah dijawabnya itu kepada peneliti. Sedangkan wawancara yang dilakukan secara “*face to face*”, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara (Adi, 2005).

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara secara langsung. Fungsi metode ini, guna memperoleh informasi tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang program BPNT.

Penulis melakukan beberapa wawancara dengan informan yaitu:

- 1) Jiwan Sanjay selaku pengolah data bantuan sosial di Dinas Sosial.
- 2) Sukron Adin, Sekretaris Desa Johorejo.
- 3) Romdhon, Kasi Pemerintahan.
- 4) Sutriyah, pemilik e-warung “Rizki Barokah”.
- 5) Penerima BPNT (Eni, Noviyani, Siti Nur Istirokhah, Surati, Nafi’atun, Siti Komala, Remi, Rusdi, Tumi, Muryati).
- 6) Narasumber lain (Sri Sugiharti, Reti, Fatimah, Kumanah).

c. Dokumentasi

Data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen atau “ *literature study*”. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah “*mateng*” (jadi) dan disebut data sekunder. Surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas meliputi monumen, foto, tape dan sebagainya (Adi, 2005).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data milik Huberman dan Miles yang disebut dengan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (Miles & Huberman, 1992).

a. Tahap reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan. Dengan demikian, proses reduksi data ini dimaksudkan guna menajamkan, mengarahkan dan membuang bagian data yang tidak dibutuhkan (Miles & Huberman, 1992).

b. Tahap penyajian data

Penyajian data dimaknai Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Data dapat menggambarkan bagaimana Kebijakan Politik Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Kendal Tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Johorejo Kecamatan Gemuh (Miles & Huberman, 1992).

c. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan/verifikasi dimaknai sebagai penarikan makna data yang telah ditampilkan. Pemberian arti ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan penafsiran yang dibuatnya. Penarikan kesimpulan ini dapat berlangsung saat proses pengumpulan data, kemudian reduksi data serta penyajian data.

Namun, kesimpulan ini belum merupakan akhir kesimpulan karena perlu adanya verifikasi hasil temuan di lapangan. Untuk memperoleh kesimpulan lapangan maka perlu dicari data lain yang baru untuk melakukan pengujian kesimpulan tadi terhadap pelaksanaan penyaluran program bantuan pangan non tunai yang ada di kota Kendal (Miles & Huberman, 1992).

G. Sistematika Penulisan

Demi menghasilkan karya yang baik dan pemahaman yang komprehensif, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal skripsi mencakup halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Bab I merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Pembahasan bab II berisi teori kebijakan publik, prinsip kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sub bab terdiri dari kebijakan publik, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pembahasan bab III berisi tentang lanskap desa Johorejo kecamatan Gemuh. Sub bab terdiri dari gambaran umum desa Johorejo dan kondisi ekonomi desa Johorejo.

Pembahasan yang tertuang bab IV berisi tentang kebijakan politik dan model terhadap distribusi bantuan pangan non tunai di desa Johorejo. Sub bab terdiri dari kebijakan bantuan pangan non tunai yang dibuat pemerintah daerah, pola distribusi bantuan pangan non tunai, dan dampak bantuan pangan non tunai pada pembangunan kesejahteraan.

Bab V sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan berisi penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir skripsi mencakup daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi tentang sumber rujukan atau referensi yang digunakan untuk penyusunan proposal penelitian. Daftar pustaka yang disusun hanya memuat sumber yang dirujuk. Dalam lampiran terdapat informasi yang diperoleh dalam penelitian yang penting dan mendukung laporan hasil penelitian, tetapi tidak bisa disajikan pada bagian utama penelitian. Lampiran

data penelitian diantaranya; Perpres No 63 tahun 2017, Permensos No 11 tahun 2018, gambar wawancara, gambar balai desa dan draf wawancara.

BAB II

PRINSIP KEBIJAKAN, KESEJAHTERAAN, PENGENTASAN KEMISKINAN DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)

A. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Secara umum, istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik (Winarno, 2014, 19).

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya” konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan” walaupun batasan yang diberikan oleh Dye dianggap agak

tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu, konsep ini dapat mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi (Winarno, 2014, 20).

Suatu kebijakan selalu memiliki tujuan. Dalam konteks tujuan tersebut, setiap substansi kebijakan publik diharapkan selalu bermanfaat untuk pemenuhan kepentingan rakyat. Hanya saja dalam konteks manfaat, setiap kebijakan publik memberikan manfaat yang berbeda untuk berbagai kelompok masyarakat. Manfaat terbesar dari kebijakan publik cenderung akan dinikmati oleh inisiator kebijakan publik. Dengan menginisiasi terbentuknya inisiator merancang “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”. Gejala ini dapat disebut sebagai politik kebijakan publik (Hamdi, 2014, 39).

2. Model Kebijakan

Model kebijakan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan pelaksanaannya, ruang lingkupnya, keberlanjutannya, dan permasalahannya.

a. Berdasarkan pelaksanaannya

berdasarkan pelaksanaannya, model kebijakan dapat dibagi dua, yakni model imperatif dan model indikatif. Model kebijakan sosial imperatif adalah kebijakan sosial terpusat, yakni seluruh tujuan-tujuan sosial, jenis, sumber,

dan jumlah pelayanan sosial, seluruhnya telah ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan seperti ini menunjuk pada pengertian kebijakan sosial yang dinyatakan oleh Dye (1976): *“Sosial policy is concerned with what governments do, why they do it, and what difference it makes.”*

Kebijakan indikatif adalah kebijakan sosial yang mengupayakan kesamaan visi dan aspirasi seluruh masyarakat. Pemerintah biasanya hanya menentukan sasaran kebijakan secara garis besar, sedangkan pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat atau badan-badan swasta (lembaga swadaya masyarakat atau organisasi sosial). Kebijakan sosial indikatif sering pula disebut sebagai kebijakan sosial partisipatif.

Pemilihan model kebijakan imperatif dan indikatif selainbanyak ditentukan oleh sistem politik negara yang bersangkutan, juga ditentukan oleh kesiapan SDM, tersedianya fasilitas dan dana, serta oleh berjalannya mekanisme pasar. Di negara-negara berkembang, dimana tingkat kesejahteraan sosialnya masih rendah serta mekaniseme pasar belum berjalan optimal, permasalahan kebijakan sosial masih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemecahan masalah sosial massal seperti kemiskinan dan keterbelakangan.

b. Berdasarkan ruang lingkup atau cakupannya

Dilihat dari cakupannya, dikenal model universal dan model selektifitas. Model universal adalah kebijakan sosial yang diarahkan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan pelayanan sosial warga masyarakat secara menyeluruh, tanpa membedakan usia, jenis kelamin, dan status sosial. Dengan demikian, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan sosial. pelayanan sosial disediakan bagi semua orang atau setidaknya semua semua orang dalam kelompok tertentu, tanpa dibatasi oleh kemampuan dan karakteristik tertentu (Suharto, 2015, 73).

Berbeda dengan model universal, model selektifitas menyatakan bahwa pelayanan sosial hanya diberikan pada mereka yang membutuhkan saja, yaitu mereka yang mengalami masalah dan membutuhkan pelayanan tertentu. Syarat utama untuk memperoleh pelayanan pelayanan biasanya ditentukan atas dasar “ketidakmampuannya” yang umumnya dilihat dari aspek pendapatan (*income*). Warga masyarakat yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan, para orang tua terlantar, anak terlantar yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara kuat adalah mereka yang dianggap layak menjadi sasaran kebijakan sosial. Baik dalam bentuk asuransi maupun bantuan sosial.

c. Berdasarkan keajegan atau keberlanjutannya

model residual dan model institusional adalah dua model kebijakan sosial dilihat dari keberlanjutan atau keajegan pelayanan sosial. Manusia normal dengan sendirinya akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya melalui kekuatannya sendiri dan dengan dukungan dari lembaga-lembaga primer dan alamiah, yakni keluarga dan pasar.

d. Berdasarkan jenis permasalahan atau sasarannya

menurut jenis permasalahannya, kebijakan sosial dapat dikelompokkan ke dalam model kategorikal dan model komprehensif. Kebijakan sosial kategorikal adalah kebijakan yang hanya difokuskan untuk mengatasi suatu permasalahan sosial berdasarkan sektor permasalahan tertentu. Kebijakan sosial di bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang ketenagakerjaan adalah contoh kebijakan sosial yang bersifat kategorikal. Berbeda dengan model kategorikal yang bersifat spesifik dan parsial, model komprehensif diarahkan tidak hanya untuk mengatasi satu bidang masalah saja, melainkan beberapa masalah sosial yang terkait diatur dan dirumuskan secara terintegrasi dalam satu formulasi kebijakan sosial terpadu (Suharto, 2015, 76).

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. Sedangkan Sosial berasal dari kata “*Socius*” yang berarti kawan, teman, dan kerja sama. Orang yang sosial adalah orang yang berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik (Fahrudin, 2012, hal. 8).

Sedangkan kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari rasa takut dan khawatir. Sentosa diartikan sebagai keadaan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan. Sedangkan makmur menandakan situasi kehidupan yang serba kecukupan dan tidak kekurangan. Sehingga, semua kebutuhan dalam hidupnya terpenuhi. Dari ketiga kata yang mencakup dalam

definisi sejahtera tersebut, maka hidup dikatakan sejahtera bila setidaknya-tidaknya memenuhi tiga persyaratan yakni: (a) terbebas dari rasa takut dan khawatir (yang berarti aman), (b) terbebas dari kesukaran (yang berarti sentosa), (c) serba kecukupan (yang berarti makmur) (Isma'il, dkk, 2015).

Tujuan diselenggarakan kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Fahrudin, 2012, hal. 10).

Menurut Todaro Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

a. Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan dan perumahan.

b. Tingkat Kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

c. Memperluas Skala Ekonomi dan Ketersediaan Pilihan Sosial dari Individu dan Bangsa

Adanya pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2. Kesejahteraan dan Kualitas Hidup

Kesejahteraan sosial juga selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup (*quality of life*). Konsep kualitas hidup selalu digunakan untuk mendiskripsikan “kehidupan yang lebih baik”. Pengertian kualitas hidup tersebut tersebut di atas sesungguhnya agak relevan jika dikaitkan dengan pengertian kesejahteraan dalam UU NO.13 Tahun 1998. Dalam UU No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal 1 ayat 1 juga dinyatakan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik materil maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kehidupan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Untuk mencapai kualitas kehidupan sedemikian maka diperlukan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang merupakan upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Manakala kondisi

kehidupan yang ingin dicapai sebagaimana tercantum dalam UU di atas tidak dapat terlaksana karena berbagai sebab, maka kesejahteraan sosial di sini dapat dikategorikan sebagai kesejahteraan sosial negatif atau kondisi kesejahteraan sosial yang perlu diperbaiki. Ketidakadilan sosial, ekonomi dan distribusi sumber ekonomi yang tidak merata, merupakan gambaran kesejahteraan suatu masyarakat yang harus diperbaiki (Fahrudin, 2012, hal. 45).

Untuk menciptakan kondisi kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang tinggi maka diperlukan penciptaan lingkungan yang mendukung, responsif dan memberdayakan individu dan masyarakat. Para pekerja sosial harusnya memberi perhatian sungguh-sungguh tentang bagaimana para pembuat kebijakan dari pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam merespon dan mengambil tindakan yang cepat dan tepat guna memenuhi kebutuhan dasar rakyat, penanganan masalah sosial dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Aktivitas seperti ini merupakan aksi politik yang ditujukan untuk mengembangkan dan memperbaiki perundang-undangan, kebijakan, program, dan mekanisme penyampaian pelayanan kepada masyarakat.

3. Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi,

menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

a. Fungsi pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b. Fungsi penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisis-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi)

c. Fungsi pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain (Fahrudin, 2012, hal. 13).

4. Kesejahteraan Sosial dalam Pembangunan

Pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (*valid*) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik. Pada umumnya, aspirasi yang paling humanistik tersebut dinyatakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara filosofis pendefinisian tersebut dapat diterima, tetapi yang jelas definisi tersebut kurang operasional, sedangkan pada umumnya para ahli pengembangan wilayah ingin mencari tolok ukur kapan pembangunan itu terjadi.

Secara umum tujuan pembangunan adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur. Meningkatnya kegiatan pembangunan, mendorong terjadinya pengelompokan penduduk ataupun kegiatan perekonomian, sehingga terjadi ketimpangan antarwilayah maupun antargolongan penduduk. Ketidakmerataan ini akan menjadi semakin besar bila tidak ditangani secara mendasar dan berlanjut (Mahi & Trigunarso, 2017, hal. 29).

C. Pengentasan Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Seseorang dikatakan miskin jika orang tersebut dengan tingkat pendapatannya tidak memungkinkan untuk mengikuti tata nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Di dalam teori sumber kesejahteraan adalah konsumsi. Tidak mungkin seseorang dapat menyadap *utility* tanpa konsumsi. Jika demikian kesejahteraan relatif tiap individu harus diproyeksikan dari tingkat konsumsinya. Secara umum ada beberapa jenis kemiskinan, yaitu (a) kemiskinan alamiah, yaitu yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam, (b) kemiskinan struktural, yaitu yang berhubungan dengan sifat kelangkaan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Sumber daya kaya tetapi dikuasai oleh orang lain sehingga yang punya sumber daya tetap miskin (Mahi & Trigunarso, 2017, hal. 35).

Sedangkan BAPPENAS (2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak

untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (BAPENAS, 2007).

Lain lagi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan (Muhdar, 2015, hal. 49).

Kemiskinan adalah suatu yang nyata adanya, bagi mereka yang tergolong miskin, mereka sendiri merasakan dan menjalani kehidupan dalam kemiskinan tersebut. Kemiskinan itu akan lebih terasa lagi apabila mereka telah membandingkannya dengan kehidupan orang lain yang lebih tinggi tingkat kehidupannya (Ahmadi, 2009, hal. 326).

Pada awal tahun 1970-an, Sajogyo menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Sajogyo membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah perdesaan dan perkotaan. Untuk daerah perdesaan, apabila seseorang hanya mengonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun. BPS (Badan Pusat Statistik) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun nonpangan. BPS menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas

kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar (Dharmawan, dkk, 2015, hal. 13).

Data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu:

- a. Keluarga Pra-Sejahtera (sangat miskin) adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu indikator tahapan Keluarga Sejahtera I.
- b. Keluarga Sejahtera I (miskin) adalah keluarga yang baru dapat memenuhi indikator-indikator berikut:
 - 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
 - 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian
 - 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dinding yang baik
 - 4) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan
 - 5) Bila pasangan usia subur ingin KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
 - 6) Semua anak berumur 7-5 tahun dalam bersekolah
- c. Tahapan Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I (indikator a dan b) dan indikator berikut:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
 - 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur
 - 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu pasang pakaian baru dalam setahun
 - 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah
 - 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing
 - 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan
 - 7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin
 - 8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi
- d. Tahapan Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang sudah memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I dan indikator Keluarga Sejahtera II (indikator a, b dan c) dan indikator berikut:
- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
 - 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang

- 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi
 - 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal
 - 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio atau tv.
- e. Tahapan Keluarga Sejahtera III plus adalah keluarga yang memenuhi indikator Tahapan Keluarga Sejahtera I, indikator Keluarga Sejahtera II dan indikator Keluarga Sejahtera III (indicator a, b, c dan d) dan indikator sebagai berikut:
- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan social
 - 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/ yayasan/institusi masyarakat (Dharmawan, dkk, 2015, hal. 15).

2. Faktor-Faktor Timbulnya Kemiskinan

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya: rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian. Dalam laporan yang dikeluarkan dari bank dunia diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu: pendidikan, jenis

pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis.

Pertama, kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi, hal ini berkaitan dengan mahalanya biaya pendidikan, walaupun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan bayaran di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Menengah Pertama (SLTP), namun komponen biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam sekolah. Biaya yang harus dikeluarkan orang misin untuk menyekolahkan anaknya juga harus termasuk biaya kehilangan dari pendapatan (*apportunity cost*) jika anak mereka bekerja. Kasus putus sekolah yang juga banyak terjadi dipedesaan menunjukkan bahwa pendidikan belum banyak menjadi prioritas bagi orangtua. Rendahnya prioritas tersebut antara lain dipicu oleh akses masyarakat terhadap pendidikan yang masih relatif kecil, terutama bagi keluarga miskin yang tidak mampu membiayai anak mereka untuk meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi (Dharmawan, dkk, 2015, hal. 66).

Kedua, kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Di wilayah pedesaan maupun perkotaan, sektor pertanian merupakan penyebab utama kemiskinan. Dalam studi tersebut juga ditemukan bahwa sektor pertanian menyumbang lebih dari 50 persen terhadap

total kemiskinan di Indonesia dan ini sangat kontras jika dibandingkan dengan sektor jasa dan industri. Dengan demikian tingginya kemiskinan di sektor pertanian menyebabkan kemiskinan diantara kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor lainnya.

Ketiga, hubungan antara kemiskinan dengan gender, di Indonesia sangat terasa sekali dimensi gender dalam kemiskinan, yaitu dari beberapa indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja di sektor informal dan lain-lainnya, penduduk perempuan memiliki porsi lebih tidak menguntungkan daripada penduduk laki-laki. Masyarakat tertata dalam sistem berlapis, ada order sosial yang bersifat atas-bawah. Siapa yang memiliki akses dalam mendapatkan sumber daya berada pada kelas yang di atas. Sistem berlapis dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bermula tidak berkelas kemudian dapat dilihat pembedaan-pembedaan berdasarkan akses dan kontrol atas sumberdaya dan kekuasaan (Sukesi, 2015, hal. 6).

Keempat, lokasi geografis ini berkaitan dengan kemiskinan karena ada dua hal *pertama*, kondisi alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. *Kedua*, pemerataan pembangunan, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa maupun pembangunan kota.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling mempengaruhi, artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi multi faktor. Namun demikian secara garis besar faktor dominan yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan diantaranya: pendidikan, pendapatan, lokasi, keterbatasan akses diantaranya akses kesehatan, keuangan dan pelayanan publik lainnya (Nurwati, 2008, hal. 13).

3. Karakteristik Kemiskinan

Menurut Chambers dalam Nasikun (2001), kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk yaitu:

- a. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- c. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha

memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

- d. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Berbagai program untuk mengatasi kemiskinan seringkali terbentur oleh perilaku kemiskinan kultural. Mereka yang mengalami kemiskinan kultural mungkin sudah pasrah dan menerima keadaan apa adanya karena keengganan mereka untuk mengentaskan diri dari kemiskinan. Kemiskinan kultural menimbulkan mental suka meminta. Sebagai contoh, kompos gas gratis yang dibagikan oleh pemerintah untuk orang miskin ternyata juga diminati oleh orang-orang yang tidak miskin. Orang-orang ini sebenarnya mampu membeli kompor gas sendiri, namun mereka memanfaatkan celah-celah kesempatan atau aturan yang menyatakan bahwa kompor ini dibagikan secara gratis kepada siapapun yang masih menggunakan kompor minyak tanah (Dharmawan, dkk, 2015, hal. 3).

4. Program Pengentasan Kemiskinan

Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan

Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya (Informatika, 2011).

Pemerintah merumuskan berbagai kebijakan program bantuan yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti bantuan beras miskin, bantuan pangan non tunai (BPNT), pemberian bantuan kesehatan jaminan kesehatan masyarakat miskin (jamkesmas), bantuan dana operasional sekolah (Bos) dengan beasiswa untuk orang miskin, bantuan bibit dan pupuk gratis untuk masyarakat petani, program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), program pengembangan kecamatan (PPK) dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri (Ras, 2013).

5. Dampak Dari Kemiskinan

Banyak dampak yang terjadi yang disebabkan kemiskinan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengangguran merupakan dampak kemiskinan, berhubungan pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat. Maka masyarakat sulit untuk berkembang mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan, dikarenakan sulit untuk bekerja (Fajriyawati, 2015). Definisi pengangguran masih

beragam. Dalam ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja.

Berdasarkan kategori usia, angkatan kerja berusia 15-64 tahun. Tapi tidak semua orang yang berusia 15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk 15-64 tahun dan sedang mencari kerja sedangkan yang tidak mencari kerja mungkin saja sedang mengurus keluarga atau sekolah, tidak masuk angkatan kerja. Jadi tingkat pengangguran adalah presentase angkatan kerja yang tidak. belum mendapatkan pekerjaan (Rahardja & Manurung, 2004, hal. 329).

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah makro ekonomi yang paling utama.

Jenis-jenis pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian di atas, maka pengangguran dibedakan menjadi tiga macam: *pertama*, Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. *Kedua*, Setengah Menganggur

(Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Ketiga, Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal (Muhdar, 2015).

- b. Tingkat kematian meningkat, masyarakat Indonesia banyak mengalami kematian karena kelaparan atau melakukan tindakan bunuh diri karena tidak kuat dalam menjalani kemiskinan yang dialami.
- c. Putus sekolah, tidak bersekolah (tingkat pendidikan yang rendah) ini membuat rakyat Indonesia tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk memperoleh pendapatan. Biaya pendidikan penyebab rakyat miskin putus sekolah. Putus sekolah (Drop Out) adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Pengertian anak putus sekolah adalah seorang anak usia sekolah antara 7 sd 21 tahun yang tidak bersekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah sebab keluarganya miskin sebagian besar menjadi pekerja anak, termasuk anak jalanan dan sebagian lagi menganggur. Setiap orang menginginkan anak-anaknya cerdas, berwawasan luas dan

bertingkah laku baik, berkata sopan dan kelak suatu hari anak-anak mereka bernasib lebih baik dari aspek kedewasaan pikiran maupun kondisi ekonomi. Lingkungan kedua bagi anak adalah sekolah. Di sekolah, guru merupakan penanggung jawab pertama terhadap pendidikan anak sekaligus sebagai suri teladan. Sikap maupun tingkah laku guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan pribadi anak (Hikmah, 2016).

- d. Tingkat kejahatan meningkat, masyarakat Indonesia jadi terdesak untuk memperoleh pendapatan dengan cara kejahatan karena dengan cara yang baik mereka tidak mempunyai modal yaitu ilmu dan keterampilan yang cukup.

D. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau yang disebut E-warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur (BPNT, 2017, hal. 5).

Penyaluran program bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun tahun 2017 di 44 Kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap,

bantuan pangan yang akan diperluas ke seluruh Kota dan Kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018, subsidi Rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial. Dengan demikian, mulai tahun 2018 Bantuan Pangan akan disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian Kabupaten yang sarana dan prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, tetap menyalurkan Rastra namun tanpa harga tebus yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (BPNT, 2017, hal. 3).

Keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Untuk mencapai keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka mekanisme pelaksanaannya diatur dengan baik.

2. Tujuan, Manfaat dan Besaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- a. Tujuan program BPNT adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
 - 2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM
 - 3) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM

- 4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dan memenuhi kebutuhan pangan
 - 5) Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
 - 6) Mendorong usaha eceran rakyat
- b. Manfaat program BPNT adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
 - 2) Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial
 - 3) Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
 - 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan
 - 5) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) (BPNT, 2017, hal. 11).
- c. Besaran Manfaat program BPNT adalah sebagai berikut:
- Besaran BPNT adalah Rp. 110.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan telur sesuai kebutuhan di E-warong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam Akun Elektronik Bantuan Pangan.

Pemilihan komoditas beras dan telur dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan tujuan peningkatan nutrisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut akan dievaluasi (BPNT, 2017).

3. Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penyaluran BPNT terdiri dari 2 tahap, pertama adalah Transfer Dana Bantuan Pangan dan berikutnya Notifikasi kepada KPM.

- a. Transfer Dana Bantuan Pangan.
 - 1) Bank penyalur membukakan akun elektronik bantuan pangan untuk masing-masing KPM berdasarkan DPM-1 perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial.
 - 2) Pemindah bukuan dana bantuan pangan dari rekening kementerian Sosial pada Bank Penyalur ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM dilakukan 30 (tiga puluh) dari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur
 - 3) Transfer dana bantuan ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM tidak dikenakan biaya administrasi
 - 4) Aktiva dilakukan melalui sistem Bank pada hari yang sama dengan transfer dana bantuan pangan ke Akun Elektronik bantuan Pangan KPM.

b. Notifikasi kepada KPM

- 1) Bank penyalur memberikan notifikasi dana bantuan pangan yang sudah di transfer ke Akun Elektronik Bantuan Pangan KPM antara lain dapat berupa SMS ke nomor HP KTM atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menginformasikan ke KPM hal-hal terkait Bantuan Pangan Non Tunai
- 2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada poin di atas sekurang kurangnya meliputi informasi bahwa transfer dan Bantuan Pangan ke rekening KPM sudah dilakukan serta jumlah dana Bantuan Tersebut
- 3) Biaya notifikasi menjadi tanggung jawab Bank Penyalur dan tidak memotong besaran Bantuan Pangan
- 4) Pembelian Bahan pangan oleh KPM pada E-warong (BPNT, 2017, hal. 48).

BAB III

LANSKAP DESA JOHOREJO KECAMATAN GEMUH

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Terbentuk

Pada tahun 1900 an Desa Johorejo masih merupakan pedukuhan dengan jumlah penduduk yang relatif masih sedikit, tidak banyak yang bisa diceritakan mengenai pedukuhan ini, hanya menurut catatan sejarah desa yang dapat dihimpun, Desa Johorejo dahulunya adalah gabungan dari dua desa yaitu Desa Joho dan Leban. Pada masa itu Desa Joho dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Niti yang berasal dari Desa Sendang (sekarang masuk wilayah Kecamatan Rowosari) sedangkan Desa Leban dipimpin oleh Kepala Desa bernama Sarun yang berasal dari Joho.

Tahun berikutnya tepatnya tahun 1918 Kepala Desa Leban yaitu Sarun meninggal dunia, sehingga praktis pada masa itu pemerintahan desa dalam keadaan kosong. Atas pertimbangan kedekatan wilayah dan kesepakatan warga masyarakat serta petunjuk dari atasan yang berkuasa pada masa itu (tidak disebutkan dalam catatan sejarah desa) untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Desa Leban. Akhirnya kedua desa tersebut digabung dengan nama Johorejo di bawah kepemimpinan Kepala Desa yang ke-1 yang bernama Niti.

Setelah beberapa pergantian kepala desa dari tahun ke tahun, tepatnya pada tahun 2014 pemilihan Kepala Desa Johorejo kembali di gelar. Dengan 4 kandidat yaitu Kaswan, Subakir, H. Supriyadi, Arief Budiyanto, SE dan Kali ini dimenangkan oleh

Arief Budiyanto, SE. Semua perangkat desa masih dijabat oleh orang yang sama pada masa pemerintahan Kepala Desa sebelumnya.

Program pembangunan yang sangat strategis karena adanya undang-undang desa yang memprogramkan semua kegiatan pembangunan dilakukan oleh desa tanpa adanya camour tangan dari pihak lain. Hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kepala desa baru desa Johorejo. Berikut struktur organisasi desa Johorejo pada tahun 2015-2020 sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Desa Johorejo

Kepala Desa	=	Arief Budiyanto, SE
Sekretaris Desa	=	Sukron Adin
Kaur Umum dan Tata Usaha	=	Setyo Wibowo
Kaur Keuangan	=	Agus Septa Nugraha
Kaur Perencanaan	=	Lutfil Adib
Kasi Pemerintahan	=	Romadhon
Kasu Pelayanan	=	Saifullah
Kasi Kesejahteraan	=	Abdul Wakhid
Kadus 1	=	Kaswan

a. Kondisi Geografi

Desa Johorejo adalah bagian dari Kecamatan Gemuh, secara astronomi Kecamatan Gemuh terletak antara 60 56' 19" Lintang Selatan - 70 3' 29" Lintang Selatan. 1100 5' 17" Bujur Timur dan 1100 09' 06" Bujur Timur. Adapun secara geografis wilayah Desa Johorejo memiliki batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Desa Truko Kecamatan Kangkung dan Desa Tlahab Kecamatan Gemuh, sebelah timur berbatasan dengan Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring, sebelah selatan berbatasan

dengan Desa Lumansari Kecamatan Gemuh dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh. Sedangkan luas wilayah Desa Johorejo adalah 1,15 km² atau 115 Ha terdiri dari tanah sawah seluas 80,26 Ha, tanah darat/perkampungan seluas 31,47 Ha., dan 3,27 Ha lahan lainnya, Adapun secara administratif Desa Johorejo terbagi dalam 2 (dua) dusun dan secara kelembagaan terbagi dalam 2 (dua) RW dan 10 RT.

Gambar 2
Peta Desa



Sumber: peta desa Johorejo

Kondisi topografi wilayah Desa Johorejo dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 15 meter diatas permukaan air laut (15 m/dpl). Wilayah Desa Johorejo merupakan daerah yang rata, tidak ada perbukitan sama sekali. Pemanfaatan tanah sebagian besar untuk pertanian tanaman pangan yakni seluas 83.53 Ha atau 72.63 % dari luas wilayah Desa Johorejo. sedangkan sisanya seluas 41.47 Ha

(27.37%) digunakan untuk bangunan perumahan/gedung serta pekarangan, tempat usaha, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Pusat pemerintahan Desa Johorejo terletak di Dusun Joho Krajan RT 01 RW 01 dan untuk menuju Kantor Desa dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki karena Desa Johorejo tidak begitu luas, letak Balai Desa terhubung dengan jalan yang telah dibeton, berhubungan langsung dengan pusat Kecamatan Gemuh.

Secara administratif Desa Johorejo terbagi atas 2 dusun yaitu :

- 1) Dusun Joho Krajan membawahi (1) RW dan (5) RT; dan
- 2) Dusun Leban membawahi (1) RW dan (5) RT.

Berdasarkan data dalam profil desa, maka desa Johorejo menurut jarak tempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jarak Tempuh

No	Nama Dusun	Ibu Kota Kecamatan	Ibu Kota Kabupaten
1.	Joho Krajan	5 km	10 km
2.	Leban	5 km	10 km

Sedangkan data geografis desa Johorejo adalah sebagai berikut:

No.	Nama Dusun	Luas (Ha)
1.	Joho Krajan	15,10 Ha
2.	Leban	16,37 Ha
	Jumlah	31,47 Ha

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dalam monografi desa antara tahun 2014 - 2019 maka perkembangan jumlah penduduk Desa Johorejo adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan
1.	2014	767	2.567	1.233	1.334
2.	2015	769	2.576	1.262	1.314
3.	2016	771	2.591	1.265	1.326
4.	2017	774	2.602	1.268	1.334
5.	2018	774	2.603	1.266	1.337
6.	2019	776	2.618	1.268	1.340

Sumber: *Wawancara*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa desa Johorejo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Penduduk paling banyak pada tahun 2019 jumlah penduduk yakni 2.618 orang, sedangkan paling sedikit pada tahun 2014 hanya 2.567 orang.

c. Tingkat Pendidikan Desa Johorejo

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut John Dewey (2005,36) pendidikan adalah suatu proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan, pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan ialah proses menyesuaikan pada tiap-tiap fase serta menambahkan

kecakapan di dalam perkembangan seseorang. Pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadikan pertimbangan bagi masyarakat untuk menilai status sosial seseorang, dimana seorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung akan mendapatkan status sosial yang lebih baik di tengah kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Hal ini mendorong seseorang untuk mencapai tingkat pendidikan setinggi-tingginya, sehingga akan mendapatkan posisi sosial di masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan data tahun 2018, tingkat pendidikan Desa Johorejo dikategorikan sudah bagus. Dari total penduduk 2.602 jiwa terdapat 100 yang tidak tamat SD. Artinya dari sisa penduduk yang tidak pernah sekolah pernah merasakan bangku sekolah dan minimal tidak buta huruf. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Johorejo.

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Johorejo

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	779
2.	Tidak tamat SD	100
3.	Tamat SD/Sederajat	931
4.	Tamat SLTP/Sederajat	423
5.	Tamat SLTA/Sederajat	276
6.	Tamat Akademi/Sederajat	29
7.	Tamat PT/Sederajat	64
8.	Buta Huruf	0
	Jumlah Total	2.602

Sumber: *Profil Desa Johorejo tahun 2018*

Tabel di atas menunjukkan mengenai tingkat pendidikan masyarakat Desa Johorejo. Melihat dari tabel di atas, sampai pada tahun 2018 ada beberapa orang yang di kategorikan masih dalam usia muda tidak pernah merasakan bangku sekolah. Dalam tabel ditunjukkan usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah berjumlah 779 orang. Sedangkan masyarakat yang sekolah dengan lulusan SD/ sederajat berjumlah 931 orang. Jika melihat dengan jenjang yang lebih tinggi seperti lulusan D3, S1 dan S2 berjumlah 29. Dari tabel dan data yang telah di paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Johorejo pendidikannya sudah maju.

d. Infrastruktur Desa Johorejo

Pertama, sarana pendidikan merupakan semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

Di desa Johorejo terdapat 1 Sekolah Dasar, 1 Masdrasah Ibtidaiyah, 1 Taman Pendidikan Alqur'an dan 1 Madrasah ibtidaiyah. Semua sarana pendidikan letaknya strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat desa Johorejo. Desa Johorejo memiliki keunggulan dalam sarana pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah dan Taman Pendidikan Alqur'an karena semua pengajar adalah lulusan dari pondok pesantren dan hafidz/hafidzoh.

Kedua, tempat peribadatan adalah tempat untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mayoritas masyarakat desa Johorejo adalah beragama Islam. Masjid “Nurul Huda” adalah masjid satu-satunya desa Johorejo yang berada di RT 03 RW 01, kegiatan-kegiatan keagamaan rutin dilakukan, seperti pengajian, peringatan hari besar agama dan lain-lain. Sedangkan desa Johorejo memiliki 8 Musholla yang berada di tiap RW.

Ketiga, sarana kesehatan yaitu tempat yang digunakan untuk upaya kesehatan. Sarana kesehatan sangat penting dan dibutuhkan masyarakat. Sarana kesehatan di desa Johorejo hanya 1 yaitu berada di rumah Bidan desa. Masyarakat Johorejo sangat terbantu dengan adanya bidan desa terutama bagi ibu-ibu hamil dan balita karena setiap sebulan sekali mereka membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Misalnya balita membutuhkan imunisasi, ibu hamil juga membutuhkan vitamin agar tetap sehat.

e. Ragam Pekerjaan Desa Johorejo

Mata Pencarian/pekerjaan merupakan suatu hal yang harus dilakukan pada setiap orang untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Masyarakat desa Johorejo merupakan masyarakat yang majemuk, dimana masyarakatnya memiliki jenis pekerjaan yang beraneka ragam.

Wilayah desa Johorejo mayoritas bekerja sebagai petani karena letaknya dikelilingi sawah. Oleh karena itu, tanah sebagai tempat untuk berusaha memiliki nilai dan arti yang sangat penting bagi masyarakat desa Johorejo. Petani desa selain menanam padi juga menanam jagung dan tempakau. Tanah juga dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan batu bata dan genteng.

Selain itu, beberapa warga yang tidak memiliki sawah melakukan migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Migrasi ini biasanya dilakukan oleh pemuda atau pemudi desa Johorejo, ada juga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) diluar negeri. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan jenis mata pencaharian Desa Johorejo:

Tabel 4
Jenis Mata Pencaharian Desa Johorejo

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/tidak bekerja	292	324	616
2	Mengurus rumah tangga	0	181	181
3	Pelajar/mahasiswa	192	180	372
4	Pensiunan	5	1	6
5	Pegawai Negeri Sipil	16	9	25
6	Tentara Nasional Indonesia	1	0	1
7	Kepolisian RI	2	1	3
8	Perdagangan	4	7	11
9	Petani/pekebun	302	278	580
10	Karyawan Swasta	25	27	52
11	Karyawan Honorer	1	1	2
12	Buruh Harian Lepas	92	102	194

13	Buruh Tani/ Perkebunan	10	8	18
14	Guru	9	15	24
15	Bidan	0	3	3
16	Perawat	0	1	1
17	Pelaut	1	0	1
18	Sopir	1	0	1
19	Pedagang	2	1	3
20	Perangkat Desa	5	0	5
21	Kepala Desa	1	0	1
22	Wiraswasta	304	198	502
Total		1.265	1.337	2.602

Sumber: *Profil Desa Johorejo tahun 2018*

Dengan mata pencaharian yang berbeda-beda seperti pada tabel di atas masyarakat desa Johorejo mayoritas bekerja sebagai petani/pekebun sebanyak 580 dengan jumlah laki-laki 302 dan jumlah perempuan 278 orang. Mata pencaharian sebagai wiraswasta berjumlah 502 dengan jumlah laki-laki sebanyak 304 dan perempuan sebanyak 198 orang. Presentasi tertinggi di Johorejo yaitu belum/tidak bekerja sebanyak 616 orang yang merupakan bayi dan lanjut usia.

2. Kondisi Ekonomi di Desa Johorejo

Kondisi ekonomi desa Johorejo dipengaruhi oleh pertumbuhan hasil pertanian, dan sedikit dari industri kecil (batu bata) serta tidak memiliki pusat perdagangan. Pertanian merupakan sektor lapangan usaha andalan bagi mayoritas penduduk di Kecamatan Gemuh. Jenis utama tanaman yang diusahakan adalah padi dan jagung. Pada tahun 2015 luas areal tanaman padi mencapai 1.604,00 Ha dengan produksi

sebesar 9.739 Ton, luas areal tanaman jagung 3.659 Ha dengan produksi sebesar 25.244 Ton.

Sampai dengan awal tahun 2000-an, pertumbuhan ekonomi masyarakat Johorejo ditopang sektor pertanian khususnya tanaman tembakau, tetapi setelah harga tembakau jatuh dan tidak mempunyai nilai ekonomi lagi, sekarang hanya mengandalkan hasil dari padi dan jagung.

Walaupun padi dan jagung menjadi andalan penghasilan petani di desa Johorejo dengan nilai ekonomi yang jauh lebih rendah dari Tembakau, tetapi harganya juga sering jatuh saat panen raya, belum lagi Petani juga dihadaapkan pada serangan hama yang luar biasa. Secara garis besar perkembangan ekonomi warga Johorejo dalam kondisi tidak menggembirakan khususnya sektor pertanian, sedang sektor lain pun tidak ada tanda-tanda perbaikan.

Untuk usaha peternakan, jenis unggas yang diusahakan adalah ayam kampung, ayam dan bebek/itik. Untuk ternak besar yang paling banyak diusahakan adalah kambing. Masyarakat Johorejo mayoritas peternak ayam karena ayam dapat membantu perekonomian mereka.

Dalam kondisi keuangan, pasar adalah sarana bertransaksi masyarakat Johorejo dalam jual beli. Sebagian besar juga ada yang berjualan dipasar terdekat yaitu pasar tlahab. Dipasar tlahab mereka melakukan aktivitas jual beli berupa sembako, barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari.

Dibawah ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan lapangan usaha sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha

No.	Lapangan Usaha	Jumlah
1.	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Perikanan	793
2.	Pertambangan dan Penggalian	-
3.	Industri Pengolahan	-
4.	Listrik dan Air Minum	-
5.	Bangunan/Konstruksi	-
6.	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel	14
7.	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	1
8.	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	-
9.	Jasa Sosial Kemasyarakatan dan Perorangan	28
10.	Lainya (kegiatan yang belum jelas batasnya)	696

Sumber: *Profil Desa Johorejo tahun 2018*

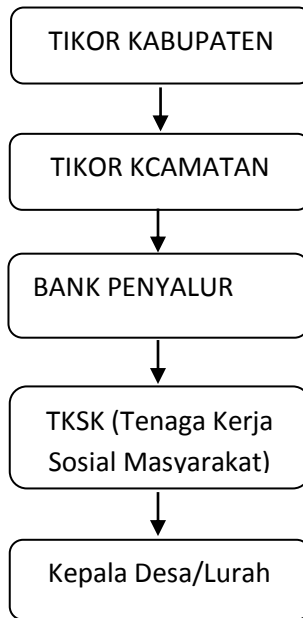
Dari data di atas, Pertanian, kehutanan, Perkebunan, dan Perikanan adalah usaha masyarakat desa Johorejo dengan jumlah paling banyak yaitu 793 orang. Pertanian menjadi usaha masyarakat karena desa Johorejo letaknya dikelilingi pesawahan. Selain itu, perkebunan juga mempengaruhi ekonomi, misalnya masyarakat yang memiliki lahan kebun luas dimanfaatkan untuk menanam pohon pisang kemudian hasil panen di jual di pasar terdekat.

BAB IV
KEBIJAKAN POLITIK DAN MODEL TERHADAP
DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI
DI DESA JOHOREJO

A. Kebijakan Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Tahun 2018

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan bentuk inovasi dari program Raskin. Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa batuan beras bersubsidi kepada rumah tangga yang berpendapatan rendah. Inovasi pada program raskin tersebut dilakukan berdasarkan dengan melihat berbagai kekurangan pada pelaksanaan program. Bentuk inovasi yang dilakukan pada program raskin menjadi program bantuan pangan non tunai ialah dengan memberikan terobosan pada produk bantuan, proses, metode pelayanan, strategi dan sistem pelayanan. Di desa Johorejo Kecamatan Gemuh, pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dilaksanakan mulai tahun 2017. Berikut Tikor dari tingkat kabupaten ke tingkat desa.

Gambar 3
Distribusi BPNT dari Kabupaten Ke Kecamatan



Sumber: *Pedoman BPNT 2017*

Dari gambar di atas adalah Tim Koordinasi sebagai pendukung pelaksanaan program BPNT. Ditingkat kota/kabupaten, penanggungjawab pelaksanaan program adalah Walikota/ Bupati. Di tingkat kota dibentuk tim pelaksana yang terdiri dari unit-unit pelaksana yang memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pelaksana program BPNT ditingkat kota yaitu;

1. TIKOR (Tim Koordinasi) ditingkat kota.

Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Bansoso pangan di wilayahnya dan membuat tim Koordinasi. Desa Johorejo termasuk desa yang berada di kabupaten Kendal, Bupati kabupaten Kendal adalah Ibu dr. Mirna Anissa, M.Si. oleh karena itu, beliau yang bertanggungjawab atas BPNT yang ada di Johorejo. Bupati membuat Tim Koordinsi Bansos Pangan Kabupaten/kota sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota.

b. Tugas

Melakukan koordinasi perencanaan, anggaran pemutakhiran data KPM, sosialisai pelaksamaam penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan dan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, terkait program BPNT Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/kota memiliki fungsi:

1) sebagai koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD

- 2) pelaksanaan Validasi dan pemutakhiran data KPM serta mengkoordinasi dengan Bank
 - 3) menyediakan pendamping atau aparat sosialisasi, verifikasi penerima bantuan
 - 4) melakukan sosialisasi BPNT kepada jajaran pemerintah daerah tingkat Kabupaten/kota, pendamping BPNT, camat dan lurah
 - 5) perencanaan dan koordinasi penyaluran BPNT kepada Bank
 - 6) pemantauan dan evaluasi ditingkat Kabupaten/kota
 - 7) pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tikor kecamatan dan perangkat desa.
 - 8) Pelaporan pelaksanaan BPNT kepada Tim Koordinasi pusat
- d. Keanggotaan Tim Koordinasi BPNT Kabupaten/kota adalah Sekretariat Daerah Kabupaten dan kota, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Koordinator Tenaga Kesejahteraan (TKS) dalam pendampingan program BPNT.
2. Tikor ditingkat Kecamatan
- Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan program BPNT diwilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi BPNT.

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Bansos Pangan kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat

b. Tugas

Melakukan koordinasi perencanaan, anggaran pemutakhiran data KPM, sosialisai pelaksanaam penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan dan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada tim Koordinasi BPNT tingkat Kabupaten/kota

c. Fungsi

- 1) Koordinasi pelaksanaan BPNT di wilayah Kecamatan
- 2) Sosialisasi BPNT di wilayah Kecamatan
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BPNT di desa/kelurahan.
- 4) Pembinaan terhadap desa/kelurahan terkait BPNT
- 5) Pelaporan pelaksanaan BPNT pada Tikor Bansos Pangan Kabupaten/kota

d. Struktur dan keanggotaan Tikor BPNT Kecamatan

Tikor BPNT kecamatan terdiri dari penanggungjawab (Camat), ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan camat.

3. Bank Penyalur

Bank penyalur adalah mitra pemerintah dalam pelaksanaan program BPNT. Bersama dengan Tim Koordinasi BPNT melakukan pengecekan kelengkapan data dari kemensos, melakukan pembukaan rekening, pencetakan kartu kombo sesuai data yang diserahterimkan oleh Kementerian Sosial, melakukan sosialisasi edukasi, melakukan distribusi dan aktivasi kartu kombo, menyalurkan dana ke rekening KPM, menyediakan mesin EDC, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bansos pangan, membuat laporan realisasi.

4. TSKS (Tenaga Kerja Sosial Masyarakat)

Berkoordinasi dengan Tikor Bansos Pangan Kota, kecamatan dan perangkat desa tentang pelaksanaan program BPNT, melengkapi data KPM untuk pembukaan rekening, membuat jadwal distribusi Kartu Kombo dan transaksi non tunai, mendampingi KPM selama proses registrasi, aktivasi rekening, dan pencairan program BPNT.

5. Kepala desa/lurah

Berkoordinasi dengan Tikor Bansos Pangan tingkat Kabupaten/kota, Tikor bansos kecamatan dan pendamping BPNT untuk menyusun jadwal pendistribusian kartu kombo beserta aktivasi rekening oleh KPM, menyediakan tempat untuk distribusi, dan aktivasi kartu kombo, memobilisasi KPM

dalam pendistribusian kartu kombo, memastikan kebenaran data dan tertib administrasinya (Farah, 2019, 101).

KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di desa Johorejo akan menerima uang nominal sebesar Rp 110.000 per bulannya. Uang tersebut kemudian akan ditransfer secara langsung ke nomor rekening yang sudah terdaftar di sistem. Jika KPM akan mengambil bantuan maka harus datang ke e-warung. E-warung merupakan agen bank, pedagang, atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur bantuan dan sudah ditentukan sebagai tempat pencairan, penukaran dan pembelian bahan pangan oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Masyarakat Desa Johorejo yang ingin menukarkan bantuan bisa datang ke agen e-warung “Rizki Barokah” yang berada di desa Johorejo RT 02 RW 01 setiap pertengahan bulan dengan cara KPM membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) lalu KPM bisa mengambil berupa beras 10 Kg dan Telur 0,25 Kg. Misalkan satu bulan bantuan tersebut tidak diambil maka bulan berikutnya KPM akan mendapat dua kali sebagai ganti, cara pengambilan bantuan juga dapat diwakilkan oleh pihak keluarga dengan syarat membawa KKS. KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) adalah sebuah kartu yang berwarna merah putih yang digunakan PKH dan BPNT untuk mengambil bantuan secara digital.

Gambar 4
E-Warong “Rizqi Barokah”



Foto E-Warong “Rizki Barokah” Desa Johorejo

Tabel 6
Penerima BPNT dan PKH Desa Johorejo Tiap RT

NO	RT/RW	BPNT	PKH
1	01/01	21	17
2	02/01	10	8
3	03/01	14	12
4	04/01	20	13
5	05/01	25	18
6	01/02	12	7
7	02/02	17	11
8	03/02	18	13
9	04/02	19	11
10	05/02	7	6
	JUMLAH	163	116

Sumber: *Profil Desa Johorejo tahun 2018*

Dari tabel di atas Desa Johorejo memiliki 10 RT dan 2 RW. Penerima BPNT terbanyak ada di RT 05 RW 01 yakni 25 orang, sedangkan paling sedikit di RT 05 RW 02 hanya 7 orang.

Daftar penerima BPNT berdasarkan pekerjaan buruh harian sebanyak 120 orang, tidak bekerja 16 orang, petani 19 orang, pedagang 6 orang, sopir 1 orang dan penjahit 1 orang. Berikut daftar penerima BPNT dalam tabel:

Tabel 7
Penerima BPNT Desa Johorejo Berdasarkan Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	BURUH HARIAN	120
2	TIDAK BEKERJA	16
3	PETANI	19
4	PEDAGANG	6
5	SOPIR	1
6	PENJAHIT	1
	JUMLAH	163

Sumber: *Profil Desa Johorejo tahun 2018*

Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa waktu tersebut dapat berupa sewa, upah/gaji, bunga atau laba. Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun, yang diterima oleh penduduk (Sukirno, 2004:37).

Dari hasil penelitian diperoleh data pekerjaan penerima BPNT desa Johorejo. Pendapatan penerima BPNT mayoritas bekerja sebagai buruh harian yang mendapatkan gaji perhari. Jika

buruh harian tidak bekerja maka tidak mendapatkan penghasilan. Petani desa Johorejo setiap panen membutuhkan buruh untuk membantu mengurus sawah.

Buruh tani yang hanya mengandalkan tenangnya, maka untuk meningkatkan pendapatan mereka berusaha mendapatkan jam kerja dan hari kerja yang lebih banyak. Bagi buruh tani yang sudah punya langganan biasanya mempunyai hari kerja yang lebih banyak dibanding buruh harian. Oleh sebab itu, biasanya buruh tani langganan mempunyai satu majikan, dan buruh harian mempunyai lebih dari satu majikan.

Selain itu, buruh harian mampu mengerjakan berbagai pekerjaan sesuai kemampuannya di bidang tani. Ada beberapa warga Johorejo yang bertani sebagai petani bawang merah. Mereka membutuhkan buruh untuk membantu pekerjaan mereka, sebagian masyarakat penerima BPNT bekerja sebagai buruh harian *negesi brambang* dengan diberi upah Rp 500,- per kilo.

Saat musim panen tembakau tiba biasanya pada bulan September, petani siap panen dan membutuhkan pekerja buruh harian. Mayoritas penerima BPNT yang bekerja sebagai buruh harian *ngroweki* (menata tembakau) adalah ibu-ibu. Mereka diberi upah Rp 2000,- per sepuluh ikat.

Selanjutnya penerima BPNT yang dilakukan pekerja laki-laki kebanyakan bekerja sebagai buruh harian membuat batu bata dan menjadi tukang bangunan. Upah untuk pekerja batu bata

sehari dibayar Rp 70.000,- dan upah untuk tukang bangunan dibayar Rp 100.000,-.

Jadi jika dikalkulasi pendapatan mereka sebulan < dari Rp 1000.000,- maka mereka layak untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berikut hasil wawancara dari Nafi'ah penerima BPNT.

“saya tidak mempunyai tempat tinggal, saya bekerja sebagai buruh harian menata tembakau kalau lagi musim tembakau, gaji saya RP 2000 per 10 gulungan/ikat. Jika dihitung sebulan pendapatan saya kurang dari Rp 700.000,- sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari anak masih kurang” (Wawancara, Nafi'ah, penerima BPNT, 21 Agustus 2019).

B. Pola Distribusi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau yang disebut E-warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur (BPNT, 2017, hal. 5).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh berlangsung sejak tahun 2017. Penyaluran beras dan telur bagi sekelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada

Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dalam memenuhi kebutuhan pangan, mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendorong usaha eceran rakyat.

Keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

“BPNT sesuai dengan 6T (Tepat sasaran, harga, jumlah, mutu, waktu, dan administrasi) targetnya mengentaskan kemiskinan dan membantu keluarga yang kekurangan dalam bentuk konsumsi sehari-hari” (Wawancara Jiwan, pengolah data Dinas Sosial Kendal, 20 Agustus 2019).

- a. Tepat sasaran adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya diberikan kepada rumah tangga miskin berdasarkan hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan diberi identitas.
- b. Tepat jumlah adalah beras dan telur untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dalam perbulan.
- c. Tepat harga adalah harga beras dan telur yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu gratis dan tidak dipungut biaya.

- d. Tepat waktu adalah pembagian beras dan telur dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.
- e. Tepat kualitas adalah kualitas beras dan telur layak untuk dikonsumsi.
- f. Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

Desa Johorejo Kecamatan Gemuh jumlah penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjumlah 163 orang sedangkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 116 orang. Berdasarkan hal tersebut penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lebih banyak daripada penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Berarti di Desa Johorejo masih banyak masyarakat kurang mampu, sedangkan salah satu tujuan dari adanya suatu program penanggulangan kemiskinan adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan atau menjadikan keluarga miskin berada pada taraf kesejahteraan, sehingga dapat dikatakan memiliki kehidupan yang layak. Dalam hal ini untuk mencapai kesuksesan suatu program BPNT di suatu daerah atau desa, harus memenuhi seluruh indikator 6T ketepatan program BPNT, berdasarkan data pada lapangan diperoleh data sebagai berikut:

1. Tepat sasaran adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya diberikan kepada rumah tangga miskin.

Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa masyarakat penerima program BPNT berjumlah 163 orang setiap bulannya berpenghasilan kurang dari Rp. 1.000.000, hal ini

membuktikan bahwa masyarakat penerima program BPNT sebagian besar adalah keluarga yang keadaan ekonominya dikatakan kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berkaitan dengan ketetapan sasaran program BPNT, ada beberapa informasi terkait kriteria penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Informan pertama saya menemui bapak Jiwan Sanjay selaku pengelola data BPNT dinas sosial Kendal. Jiwan menyampaikan bahwa:

“kriteria menentukan penerima BPNT dulu menggunakan BDT (Basis Data Terpadu) sekarang berubah ada permensos no 5 tahun 2019 bukan BDT tetapi DTKESOS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) semua bantuan pemerintah masuk kesitu, misalkan data tidak masuk, data tidak akan diterima. Ada beberapa kategori penerima BPNT sangat miskin, miskin dan lainnya” (Wawancara, Jiwan Sanjay, Pengolah Data BPNT, 20 Agustus 2019).

Hal serupa juga disampaikan sekretaris desa Johorejo, Sukron Adin bahwa:

“penerima bantuan termasuk dalam kategori sangat miskin dan kategori miskin dengan cara di lihat dari rumahnya, penghasilanya, jumlah keluarga dll” (Wawancara, Sukron, Sekretaris desa, 7 Oktober 2019).

Informasi lain disampaikan oleh penerima BPNT, Siti Nur Istirokhah yang pekerjaannya hanya buruh harian bahwa:

“saya orang tidak mampu, pekerjaan saya buruh harian *negesi brambang* gajianya sekilo dapat RP 500 kalau sekarung kira-kira RP 10.000” (Wawancara, Siti Nur Istirokhah, penerima BPNT, 21 Agustus 2019).

Eni pedagang sayur, ibu yang memiliki 4 orang anak ini juga mengatakan bahwa:

“karena saya orang kurang mampu, anak saya banyak, sekolah semua, saya cuma pedagang sayur penghasilan perhari tidak seberapa, masih kurang untuk menghidupi keluarga” (Wawancara, Eni, penerima BPNT dan PKH, 21 Agustus 2019)

Menurut penulis berdasarkan hasil wawancara di atas oleh informan, bahwa program BPNT di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh sudah tepat sasaran, karena berdasarkan KPM disana hampir keseluruhan KPM digolongkan keluarga kurang mampu, sehingga mereka berhak menerima bantuan BPNT.

Akan tetapi ada beberapa warga yang komplain karena mereka menganggap bahwa mereka layak mendapatkan bantuan. Berikut wawancara dengan Sukron selaku sekretaris desa Johorejo:

“Sangat disayangkan bagi mereka yang tidak mendapat bantuan ada beberapa yang komplain terkait bantuan non tunai. Harusnya mereka menyadari bahwa mereka masyarakat yang tidak tercatat sebagai penerima berarti mereka itu

masyarakat yang mampu” (Wawancara, Sukron, Sekretaris desa, 7 Oktober 2019).

Menurut penulis, masyarakat yang komplain dengan pembagian bantuan tersebut bukan masalah besar hanya saja karena kekurangan pendataan masyarakat desa Johorejo. Namun demikian BPNT yang sudah di distribusikan menimbulkan ketidakterimaan beberapa pihak seperti wawancara Reti:

“....tidak tahu, tidak ada yang mendata penerima bantuan dirumah saya, rumah saya memang bukan termasuk kriteria karena lantainya berkeramik tapi kan itu dulu. Saya bangun rumah saat bekerja sebagai TKW. Sedangkan sekarang saya sudah tidak bekerja hanya menerima pendapatan dari suami” (Wawancara, Reti, bukan penerima BPNT, 22 Agustus 2019).

Reti merasa bahwa tidak ada yang mendata terkait bantuan padahal menurut penulis Reti dilihat dari rumah dan penghasilan sudah memenuhi kriteria orang mampu dan keluarga sejahtera. Dalam teori kesejahteraan, kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik (Fahrudin, 2012, hal. 8).

Dalam hal ini Sukron menyampaikan terkait adanya pendataan ulang, agar masyarakat penerima benar-benar layak mendapatkan bantuan. Berikut wawancara dengan Sukron:

“untuk keberhasilan penyaluran BPNT itu akan melakukan evaluasi ulang dan memeriksa data agar tepat sasaran. Ketika ada warga yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan insyaallah akan kita usulkan, hasil evaluasi akan memberikan masukan bagaimana mengetahui tantangan distribusinya” (Wawancara, Sukron, Sekretaris desa, 7 Oktober 2019).

Jiwan Sanjay menambahi program BPNT sangat efektif dibanding program bantuan sebelumnya, karena program Rastra tidak berjalan dengan baik, masih banyak beras yang tersalurkan tidak teralisasi dengan baik. Berbeda dengan BPNT, tidak ada pihak manapun bisa melakukan kecurangan. Berikut wawancara dengan Jiwan bahwa:

“BPNT dapat dikatakan berhasil, karena pernah mendapatkan penghargaan dari kementerian 10 besar yang realisasinya bagus sewilayah II dalam bentuk penyalurannya” (Wawancara, Jiwan Sanjay, Pengolah Data BPNT, 20 Agustus 2019).

Setelah adanya BPNT dalam waktu 2 tahun secara nyata memiliki perubahan yang cukup signifikan, tercatat dari warga yang tidak mampu setelah penulis wawancarai merasa lebih senang karena terbantu, mereka mendapat bantuan secara finansial apalagi dilihat dari profesi mereka yang mayoritas buruh sehingga layak di apresiasi adanya BPNT. Kemiskinan di desa Johorejo Kecamatan Gemuh menurut penulis sudah dikatakan dapat mengentaskan kemiskinan

sedikit demi sedikit. Dengan adanya program BPNT akan menjadikan desa Johorejo kecamatan Gemuh lebih sejahtera.

2. Tepat jumlah adalah beras dan telur untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dalam perbulan.

Berdasarkan wawancara dengan penerima BPNT mereka mengatakan bahwa setiap bulan mendapatkan 10 kg beras/bulan dan 0,25 kg telur/bulan. Penerima mengambil bantuan di agen e warung. Di agen e warung disediakan daftar penerima BPNT.

Penulis juga mendapatkan informasi dari pemilik agen e warung yaitu Sutriyah. Informan mengatakan:

“untuk beras 10 kg/bulan dan telur 0,25kg/bulan, tapi semisal bulan ini tidak diambil berarti bulan depan mendapat 20 kg beras dan ½ kilo telur” (Wawancara, Sutriyah, Agen e-warung, 23 Agustus 2019).

Sehingga berdasarkan hasil wawancara oleh informan di atas bahwa program BPNT di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh sudah tepat jumlahnya yaitu berupa beras 10 kg dan telur 0,25 kg.

3. Tepat harga adalah beras dan telur yang diberikan kepada KPM sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu gratis tidak dipungut biaya.

Berdasarkan wawancara menurut Romdhon bahwa pengambilan Bantuan Pangan Non Tunai tersebut sangat mudah dan gratis. Caranya penerima datang ke e-warung sesuai tanggal pengambilan bantuan lalu menyerahkan Kartu

Keluarga Sejahtera (KKS) yang di dalamnya berisikan saldo untuk ditukarkan beras dan telur tersebut.

Menurut penulis berdasarkan wawancara di atas bahwa program BPNT di Desa Johorejo sudah tepat harga yakni gratis.

4. Tepat waktu adalah pembagian beras dan telur dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Sutriyah pemilik agen e warung menyampaikan bahwa pengambilan BPNT yaitu setiap pertengahan bulan yakni tanggal 15 bantuan bisa diambil dibatasi sampai tanggal 25 dikarenakan pada tanggal 25 seluruh agen mengadakan pertemuan dengan bank di kecamatan Gemuh guna membahas berapa beras dan telur yang di keluarkan dan berapa orang aynng belum mengambil bantuan.

Berdasarkan wawancara dengan Sutriyah menurut penulis program BPNT sudah tepat waktu dalam pembagiannya.

5. Tepat kualitas adalah kualitas beras dan telur layak untuk dikonsumsi.

Menurut beberapa informan memang beras yang dikonsumsi layak dan telur yang dikonsumsi juga masih fresh. Berbeda dengan program bantuan sebelum BPNT. Raskin adalah bantuan beras untuk masyarakat miskin. Informan mengaku bantuan Raskin berasnya kadang berwarna agak kehitaman. Saat dimakan rasanya juga hambar.

Sehingga menurut penulis program BPNT di desa Johorejo sudah tepat kualitasnya. Telur dan beras yang diberikan layak dikonsumsi dan benar-benar dalam keadaan fresh.

6. Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

Beberapa informan mengatakan bahwa tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerima beras dan telur. Dan Sukron membenarkan tidak ada persyaratan dalam mengambil beras dan telur Cuma pada saat di awal itu ada persyaratan yaitu Kartu Keluarga (KK) sebagai pendataan.

Penulis juga menemui beberapa narasumber yang tidak tahu persis terkait Bantuan Pangan Non Tunai. Menurut penulis berdasarkan di atas bahwa program BPNT di desa Johorejo masih belum tepat administrasinya karena mereka tidak pernah mendapatkan informasi dari kecamatan atau desa mengenai program BPNT ini dan juga tidak ada sosialisasi terkait program BPNT ini.

Berdasarkan indikator 6T di atas dapat disimpulkan bahwa pola distribusi program BPNT di desa Johorejo Kecamatan Gemuh sudah memenuhi 6 indikator tercapainya program BPNT. Karena sudah ada 5 indikator yang terlaksana dengan baik namun hanya 1 indikator yang di rasa belum terpenuhi.

C. Cara Rakyat Mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pada dasarnya, bantuan pangan yang diberikan pemerintah diharapkan dapat membantu masyarakat agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Karena selama ini masyarakat berpenghasilan sangat rendah, harus membelanjakan uang mereka pada kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng dan telur. Sehingga tidak lagi tersisa untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Berikut hasil wawancara terkait prosedur cara masyarakat mendapatkan BPNT, dengan Sukron sebagai berikut:

“.....untuk menyalurkan bantuan non tunai ini diawali dengan pendaftaran peserta penerima yang dilakukan oleh Kementrian Sosial (KEMENSOS) dari situ, calon penerima bantuan akan mendapatkan surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran ditempat yang telah di tentukan. Data yang telah diisi oleh calon penerima program lalu di proses. Setelah verifikasi data, penerima akan di bukakan rekening di bank dan mendapatkan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk mengambil bantuan pangan” (Wawancara, Sukron, Sekretaris desa, 7 Oktober 2019).

Jiwan Sanjay selaku pengolah data BPNT Dinas Sosial Kendal juga mengatakan:

“ketika sudah merubah data, verifikasi data dan validasi, data akan diambil oleh PFM (Penanganan Fakir Miskin) Kemensos, setelah diolah oleh PFM akan di distribusikan ke Bank apabila nama KPM tidak sesuai dengan NIK maka tidak akan dicetakkan kartu, apabila sudah sesuai akan

dicetakkan KKS, kemudian akan di distribusikan ke bank cabang setelah itu bank tersebut yang akan mendistribusikan ke kecamatan-kecamatan” (Wawancara, Jiwan Sanjay, Pengolah Data BPNT, 20 Agustus 2019).

Jadi, dengan melihat beberapa informan terkait cara mendapatkan BPNT penulis berpendapat, bahwa untuk mendapatkan BPNT harus melalui beberapa cara. Data yang masuk dirasa benar tepat sasaran, karena melalui beberapa tahapan. Masyarakat desa Johorejo untuk menentukan kriteria penerima BPNT juga sudah memenuhi persyaratan.

Berikut tahapan gambar tentang cara mendapatkan BPNT sebagai berikut:

Gambar 5
Cara Mendapatkan Bpnt



NASKAH: DANA ADITIASARI | INFOGRAFIS: ANDHIKA AKBARYANSYAH/DETIKCOM

Sumber : Detikfinance, Kamis, 23 Feb 2017 17:07 WIB

Dari gambar di atas, berikut cara mencairkan BPNT setiap keluarga sudah mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). *Pertama*, KPM datang ke e warung “Rizki Barokah” karena e warung tersebut sudah di akui dan bekerjasama dengan Bank HIMBARA. *Kedua*, melakukan cek kuota BPNT melalui mesin EDC Bank dan memasukan kode rahasia (PIN) dan menerima bukti transaksi. *Ketiga*, pilih jenis bantuan sesuai kuota dan terahir mnerima barang yang telah diambil dan bukti transaksi. *Keempat*, terima barang yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan.

D. Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Pembangunan Kesejahteraan

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut penulis mempunyai dua dampak sosial yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif karena mereka mendapatkan bantuan berupa bahan pangan dan uang, bisa juga berdampak negatif jika ada masyarakat yang tidak menerima bantuan merasa iri, merasa dirinya itu layak mendapatkan bantuan tetapi tidak terdata sebagai penerima BPNT. Dampak positif juga mengandung indikator kesejahteraan rakyat pada tahun 2018 yang meliputi kesehatan, gizi, pendidikan dan taraf hidup.

Berikut dampak positif berdasarkan wawancara dengan Eni selaku narasumber:

“sangat senang, saya sangat berterimakasih karena untuk masalah pangan khususnya beras saya tidak mengeluarkan biaya lagi, yang pada akhirnya saya bisa menyisihkan uang untuk keperluan lainnya. Bantuan yang saya terima beras dan telur. Tetapi bantuan ini juga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan saya sehari-hari, namun beras yang diberikan enak dan bantuan kali ini ada berupa lauknya, setidaknya keluarga saya pun mendapat asupan nutrisi yang seimbang” (Wawancara, Eni, penerima BPNT, 21 Agustus 2019).

Adapun hasil wawancara dengan Surati mengenai tentang membaiknya keadaan ekonomi setelah mendapatkan BPNT sebagai berikut:

“senang bisa meringankan pengeluaran, apalagi saya sudah tidak punya suami, bantuan beras dan telur lumayan bisa membantu. Bantuan beras bisa dimakan 13-14 hari dan sekarang saya ada peningkatan sehari makan 3 kali” (Wawancara, Surati, penerima BPNT, 21 Agustus 2019).

Dari hasil wawancara narasumber di atas menurut penulis sangat membantu mengurangi beban ekonomi, walaupun dirasa tidak dapat mengatasi masalah kemiskinan. Narasumber penerima BPNT merasa sangat senang dan terbantu. Hal ini memberikan dampak positif bagi mereka penerima BPNT.

Dalam hal pendidikan, juga memberikan dampak positif, terutama kaum perempuan. Perempuan merupakan pihak yang paling bertanggungjawab dalam mengelola uang. Saat mereka mendapat uang dari pemerintah, perempuan punya keinginan

untuk memenuhi kebutuhan primer anaknya seperti uang sekolah atau gizi yang cukup. Seperti yang dikatakan Siti Komala:

“saya sangat senang mendapatkan bantuan BPNT dan PKH karena dapat membantu perekonomian. Bantuan tersebut saya prioritaskan untuk membelikan keperluan sekolah anak saya.” (wawancara, Siti Komala, penerima BPNT, 21 Agustus 2019).

Dalam peningkatan taraf hidup, ada masyarakat penerima BPNT dan PKH yang sudah membuka usaha sendiri. Bantuan dari pemerintah digunakan sebagai modal dalam berwirausaha sehingga taraf hidup meningkat dan tidak perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah lagi.

Dampak negatifnya adanya bantuan non tunai dari pemerintah membuat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Masyarakat penerima bantuan terbiasa mendapatkan bantuan sebulan sekali, mereka akan menunggu waktu pencairan bantuan. Kemiskinan adalah suatu yang nyata adanya, bagi mereka yang tergolong miskin, mereka sendiri merasakan dan menjalani kehidupan dalam kemiskinan tersebut. Kemiskinan itu akan lebih terasa lagi apabila mereka telah membandingkannya dengan kehidupan orang lain yang lebih tinggi tingkat kehidupannya (Ahmadi, 2009, hal. 326). Penerima bantuan merasa bahwa dirinya kurang mampu dan berhak dibantu pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data penelitian yang telah dikumpulkan dan dibahas pada penelitian ini mengenai Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Kendal, terkait distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Johorejo, kecamatan Gemuh tahun 2018 yaitu:

1. Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai dibuat secara nyata oleh pemerintah dan merupakan transformasi dari program Rastra. Hal ini menunjukkan keperpihkan kepada masyarakat kecil berupa Bantuan Pangan Non Tunai yang didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu sesuai dengan kriteria penerima. Dalam peraturan ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan bantuan berupa Non Tunai.
2. Pola distribusi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus sesuai dengan indikator 6T yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Di desa Johorejo Kecamatan Gemuh dikatakan sudah memenuhi 6T tercapainya program Bantuan Pangan Non Tunai. Sehingga pola distribusi BPNT tepat untuk mengurangi beban biaya hidup. Program penanggulangan kemiskinan adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan atau

menjadikan keluarga miskin berada pada taraf kesejahteraan, sehingga dapat dikatakan memiliki kehidupan yang layak.

3. Dampak Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada pembangunan kesejahteraan masyarakat terdapat empat dampak positif dari program Bantuan Pangan Non Tunai yakni *pertama*, dapat membantu meringankan sekolah. *Kedua*, dapat membantu meringankan beban pengeluaran. *Ketiga*, taraf hidup keluarga KPM mampu membuka usaha sendiri, sehingga masalah ekonomi teratasi. *Keempat*, Dapat membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Menurut penulis hanya ada satu dampak negatif yakni adanya bantuan non tunai dari pemerintah membuat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan hal-hal yang sekiranya perlu diperbaiki dalam mekanisme kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yaitu:

1. Perlu adanya pendataan ulang yang dilaksanakan tiga bulan sekali atau setahun sekali terkait calon penerima bantuan agar masyarakat penerima yang merasa sudah terbantu ekonominya selama beberapa bulan dan merasakan perubahan atau semisal memiliki usaha dagang bisa di coret dari daftar penerima bantuan.

2. Sosialisasi di Desa Johorejo perlu dilakukan agar masyarakat bisa paham alur bantuan serta kegunaan bantuan tersebut.
3. Seharusnya masyarakat yang merasa kehidupan ekonominya sudah tercukupi harus punya kesadaran bahwa dirinya tidak perlu menerima bantuan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K., Dharmawan, DKK. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: IKAPI DKI Jakarta.
- Adi, R. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ahmadi, A. (2009). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BAPENAS. (2007). *Kumpulan Bahan Pelatihan, Pemantauan dan Evaluasi Program-program Penanggulangan Kmiskinan*. Jakarta: BAPENAS.
- BPNT (2017). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta: Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Edi, S. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fahrudin, A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fajriyawati. (2015). *Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin*. Fajfiyawati,8.
- Fifi, K.U., & Taufiqo. (2018). *Dampak Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia*. JEDI. Vol 1, No.2,27.
- Fitriawan, B. (2017, Oktober 20). *Pengaruh Faktor SosioEkonomi dan Politik Terhadap Distribusi Anggaran Conditional Cash Transfer di Indonesia*. Rifqi Imaduddin, p.1.
- Hamdi, M. (2015). *Kebijakan Publik (Proses, Analisis dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Herdiansyah, Haris (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indrawan, R., & Yaniawati, R.P. (2005, 135). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Informatika, K.K. (2011). *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Jakarta.
- Isma'il, M.,DKK. (2015). *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*. Jakarta: Erlangga.
- Jogloabang (2018). From <https://www.jogloabang.com/> komunitas/ permensos-no-1-tahun-2018-tentang-program-keluarga-harapan
- John W. Creswell (1991, 37). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications.
- Jundi, M. A. (2014). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Indonesia*. JUNDI, 3.
- Kemensos. (2017). Retrieved 12 26, 2018, from <https://www.kemosos.go.id/content/bantuan-sosial>
- Mahi, A.K & Trigunarso (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Depok: PT Kharisma Putra Utama.
- Miles, M.B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif : buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhdar. (2015). *Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Masalah Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi*. Al Buhuts, Volume 11 Nomor 1 hal 46.

- Nurwati, N. (2008). *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No.1 hal 13.
- Priyatin, S. (2018, Mei 24). Kompas.com. Retrieved Desember 26, 2018, from Kompas. Com: <https://regional.kompas.com/read/2018/05/24/15514211/masih-ada-63000-penduduk-miskin-di-kendal-yang-bergantung-subsidi>.
- Raharja, P & Manurung (2004) *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikroekonomi dan Makroekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomu Universitas Indonesia.
- Ramadhan, T. (2018). *Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru*, JOM FISIP. Vol 5 edisi II, 1.
- Ras, A. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Socius, 61 Vol XIV.
- Risnandar, & Broto, A. W. (2018). *Implementasi Program BPNT di Indonesia*, Sosio Konsepsia Vol. 7, No.03, 148.
- Rofiq, A. (2014). *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kebijakan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Anggota IKAPI DKI Jakarta.
- Sari, D. C. (2016, Maret 20). *Impor Kedelai Indonesia dari Amerika Serikat (analisis ekonomi politik)*. P. 1.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV alfabeta.
- Suharto, Edi. (2014). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sukesi, K. (2015). *Gender dan Kemiskinan di Indonesia*. Malang:TIM UB Press.
- Sukirno, Sadono (2004). *Pengantar Teori Makroekonomi edisi ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, S. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Jakarta: PT Buku Seru.

Wawancara Nafi'ah tanggal 21 Agustus 2019

Wawancara Jiwan Sanjay tanggal 20 Agustus 2019

Wawancara Sukron Adin tanggal 7 Oktober 2019

Wawancara Siti Nur Istirokhah tanggal 21 Agustus 2019

Wawancara Eni tanggal 21 Agustus 2019

Wawancara Reti tanggal 22 Agustus 2019

Wawancara Sutriyah tanggal 23 Agustus 2019

Wawancara Siti Komala tanggal 21 Agustus 2019

LAMPIRAN 1

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi; b. bahwa penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON
TUNAI.**

LAMPIRAN 2

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, negara melaksanakan penanganan fakir miskin dengan melakukan penyaluran bantuan sosial pangan; b. bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial pangan yang efektif, tepat sasaran, dan mendorong keuangan inklusif, perlu melaksanakan penyaluran bantuan sosial pangan secara nontunai yang transparan dan akuntabel; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);

LAMPIRAN 3

Wawancara dengan Jiwan Sanjay (Pengolah Data BPNT Dinas Sosial Kendal)



LAMPIRAN 4

Wawancara penerima BPNT



LAMPIRAN 5

Wawancara warga bukan penerima BPNT



LAMPIRAN 6

Gambar Balai Desa Johorejo



LAMPIRAN 7

Draf wawancara Jiwan Sanjay (pengolah data BPNT Dinas Sosial Kendal). Tanggal 20 Agustus 2019.

1. Apa latar belakang program BPNT?

“Jadi terbentuknya program BPNT berawal dari program yang dibentuk pemerintah yaitu program Raskin saat berganti menteri Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si program tersebut berganti nama menjadi Rastra karena ada program baru yang harus berbasic kartu digital munculah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berbentuk Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS)”.

2. Apa tujuannya?

“tujuannya adalah untuk ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan tersebut kepada orang yang menerima dan juga mencegah kecurangan-kecurangan pada saat program Rastra dalam pendistribusiannya”

3. Apa target yang hendak dicapai?

“BPNT sesuai dengan 6T (Tepat sasaran, harga, jumlah, mutu, waktu, dan administrasi) targetnya mengentaskan kemiskinan dan membantu keluarga yang kekurangan dalam bentuk konsumsi sehari-hari”

4. Diambil darimana anggaran tersebut?

“ anggaran diambil dari APBN”

5. Bagaimana pola pendistribusiannya?

“ketika sudah merubah data, verifikasi data dan validasi, data akan diambil oleh PFM (Penanganan Fakir Miskin) Kemensos, setelah diolah oleh PFM akan di distribusikan ke Bank apabila nama KPM tidak sesuai dengan NIK maka tidak akan dicetakkan kartu, apabila sudah sesuai akan dicetakkan KKS, kemudian akan di distribusikan ke bank cabang setelah itu bank tersebut yang akan mendistribusikan ke kecamatan-kecamatan”.

6. Bagaimana kriteria penerima BPNT?

“dulu menggunakan BDT (Basis Data Terpadu) sekarang berubah ada permensos no 5 tahun 2019 bukan BDT tetapi DTKESOS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) semua bantuan pemerintah masuk kesitu, misalkan data tidak masuk, data tidak akan diterima. Ada beberapa kategori penerima BPNT sangat miskin, miskin dan lainnya”

7. Bagaimana cara menentukan penerima BPNT?

“sasaran KPM yakni keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial yang ditetapkan berada di wilayah-wilayah pesisir, daerah tinggi/terpecil, atau perbatasan antarnegara”

8. Apa manfaat bagi masyarakat?

“BPNT sangat membantu dan memudahkan, BPNT juga dirasa sulit untuk melakukan hal-hal kecurangan karena penerima BPNT belanja sendiri ke e-warung (agen yang sudah ditunjuk dan bekerjasama dengan bank BTN”

9. Bagaimana hasil evaluasinya?

“BPNT dapat dikatakan berhasil, karena pernah mendapatkan penghargaan dari kementrian 10 besar yang realisasinya bagus sewilayah II dalam bentuk penyalurannya”

LAMPIRAN 8

Draf wawancara Sutriyah (pemilik e-warung). Tanggal 23 Agustus 2019.

1. Kapan e-warung berdiri?
“sebenarnya warung saya berdiri sudah lama, tapi pada tahun 2017 sejak adanya bantuan non tunai warung saya di pilih sebagai agen e warung untuk pengambilan bantuan non tunai di warung saya”
2. Apakah sama Rastra dan BPNT?
“dulu namanya program Rastra dan sekarang BPNT, jelas beda cara maupun bantuan yang di berikan, ketika dulu Rastra/Raskin berupa isi 15 Kg dengan harga tebus beras 1.600/kg. Sementara untuk nilai BPNT adalah Rp.110.000/bulan. Bantuan non tunai tidak boleh diambil uang, harus ditukarkan dengan beras atau telur”
3. Berapa kilo beras dan telur yang diberikan?
“untuk beras 10 kg/bulan dan telur 0,25kg/bulan, tapi semisal bulan ini tidak diambil berarti bulan depan mendapat 20kg beras dan ½ kilo telur”
4. Kapan waktu pengambilan BPNT?
“biasanya bantuan diambil pada pertengahan bulan, tapi semisal bulan ini tidak diambil, maka bisa diambil bulan depannya berarti bulan depan mengambil bantuan dobel”
5. Bisakah mengambil bantuan diwakilkan?

“bisa, kebanyakan yang mendapat bantuan itu lansia, nah misal diambilkan anaknya atau keluarganya gitu bisa tinggal bawa kartu keluarga sejahtera (KKS) ke warung saya lalu tanda tangan”

6. Bagaimana cara mengetahui isi saldo KKS?

“penyalur bantuan akan mendapatkan laporan rinci seputar jumlah dana yang telah disalurkan, jumlah dana yang ditarik, dan jumlah dana yang tersisa dan berapa orang penerima yang belum menarik bantuan pangannya”

7. Sejauh ini bagaimana evaluasinya terkait BPNT?

“menurut saya bantuan non tunai ini sangat membantu, rakyat juga memperoleh nutrisi seimbang, tidak hanya karbohidrat tetapi juga protein, seperti telur. KKS digunakan untuk memperoleh beras dan telur sesuai harga yang berlaku.”

LAMPIRAN 9

Draf Wawancara Sukron Adin (Sekretaris desa). Tanggal 7
Oktober 2019.

1. Mulai kapan BPNT diberlakukan di desa Johorejo?
“pada dasarnya program Bantuan non tunai merupakan transformasi dari program Rastra yang sudah ada sejak tahun 2015 dan berjalan efektif tahun 2017 lalu program tersebut pada tahun 2017 diganti menjadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)”
2. Apa tujuannya?
“sudah pasti tujuan bantuan tersebut untuk membantu meringankan warga yang kurang mampu khususnya membantu dalam ekonomi mereka”
3. Bagaimana kriteria penerima BPNT?
“penerima bantuan termasuk dalam kategori sangat miskin dan kategori miskin dengan cara di lihat dari rumahnya, penghasilanya, jumlah keluarga dll”
4. Bagaimana pola distribusinya?
“untuk menyalurkan bantuan non tunai ini diawali dengan pendaftaran peserta penerima yang dilakukan oleh Kemetrian Sosial (KEMENSOS) dari situ, calon penerima bantuan akan mendapatkan surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran ditempat yang telah di tentukan. Data yang telah diisi oleh calon penerima program lalu di proses. Setelah verifikasi data, penerima akan di bukakan rekening di bank dan mendapatkan

kartu keluarga sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk mengambil bantuan pangan”

5. Apakah penerima BPNT bisa berubah?

“ya bisa, kita lihat dulu ada 4 kategori penerima bisa berubah a) rendah domisili, b) meninggal, c) duplikasi data, d) peningkatan status dari pra sejahtera menjadi sejahtera. Tahun 2019 ini ada beberapa tambahan warga yang dirasa layak untuk mendapatkan bantuan, caranya kita survei dulu jika layak baru kita usulkan”

6. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat desa?

“tentu memberikan banyak dampak positif, dengan adanya bantuan warga senang bisa terbantu kehidupan sehari-hari, apalagi warga yang memiliki anak yang masih sekolah bisa sangat membantu mereka. Dampak negatifnya sangat disayangkan bagi mereka yang tidak mendapat bantuan ada beberapa yang komplain terkait bantuan non tunai. Harusnya mereka menyadari bahwa mereka masyarakat yang tidak tercatat sebagai penerima berarti mereka itu masyarakat yang mampu”

7. Apa harapan kedepannya?

“untuk keberhasilan penyaluran BPNT itu akan melakukan evaluasi ulang dan memeriksa data agar tepat sasaran. Ketika ada warga yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan insyaallah akan kita usulkan, hasil evaluasi akan memberikan masukan bagaimana mengetahui tantangan distribusinya”

LAMPIRAN 10

Draf Wawancara Eni (penerima). Tanggal 21 Agustus 2019

1. Apa itu BPNT?
“tidak tahu, tetapi saya punya kartu bantuan warna merah putih”
2. Sudah berapa kali mendapat bantuan?
“mulai tahun 2017 berarti kalau dihitung sudah mendapat bantuan 4 kali dalam setahun kalau dari tahun 2017 berarti sudah 8 kali”
3. Mengapa bisa mendapat bantuan tersebut?
“karena saya orang kurang mampu, anak saya banyak, sekolah semua, saya cuma pedagang sayur penghasilan perhari tidak seberapa, masih kurang untuk menghidupi keluarga”
4. Digunakan untuk apa?
“digunakan untuk biaya sehari-hari dan biaya sekolah anak”
5. Dimana mengambil bantuan tersebut?
“di bank BRI terdekat dan di agen warung”
6. Kapan mengambil bantuan?
“setiap tiga bulan sekali dalam setahun, kalau untuk bantuan PKH dan kalau non tuni sebulan sekali”
7. Cara mengambilnya bagaimana?
“seperti mengambil uang di Atm”

8. Dapat apa aja?

“dapat uang, anak saya yang SD Rp 900.000 per tahun yang SMP Rp1.500.000 per tahun dan yang SMA Rp 2.000.000 per tahun, sedangkan perbulan dapat sembako”

9. Sebelum ini mendapat bantuan berupa apa?

“Rastra”

10. Senang tidak mendapat bantuan?

“sangat senang, saya sangat berterimakasih karena untuk masalah pangan khususnya beras saya tidak mengeluarkan biaya lagi, yang pada akhirnya saya bisa menyisihkan uang untuk keperluan lainnya. Bantuan yang saya terima beras dan telur. Tetapi bantuan ini juga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan saya sehari-hari, namun beras yang diberikan enak dan bantuan kali ini ada berupa lauknya, setidaknya keluarga saya pun mendapat asupan nutrisi yang seimbang”

AFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fithroh Amalika Dewi
NIM : 1506016008
Tempat, tgl lahir : Kendal, 10 Januari 1997
Agama : Islam
Alamat : Johorejo 03/01 Kec. Gemuh
Kab. Kendal
Fakultas/Jurusan : Fisip/Ilmu Politik
No Hp : 089505528542



Pendidikan Formal

1. TK Pertiwi Tamangede
2. MI NU 33 Johorejo
3. SMP NU 05 Awwalul Hidayah Gemuh
4. MA Negeri Kendal

Pendidikan Non Formal

1. PP Al Ishlah Mangkangkulon Tugu Kota Semarang
2. PPTQ Al Ishlah Mangkangkulon Tugu Kota Semarang
3. PPTQ Al Hikmah Tugurejo Tugu Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 November 2019
Tertanda,

Fithroh Amalika Dewi